

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan Langkah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Setiap strategi bisa untuk satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran menggunakan beberapa strategi. Strategi memiliki parameter keberhasilan dan kegagalan yang berupa capaian indikator kinerja, pengelolaan kapasitas birokrasi, sistem menejemen atau implementasi teknologi.

6.1 STRATEGI

6.1.1 Strategi pada RPJPD Provinsi Banten 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 tahap akselerasi I berakhir dan dilanjutkan dengan RPJMD Provinsi Banten 2018-2022 (Tahap akselerasi II) . Dalam menyelaraskan perencanaan daerah tersebut merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Banten tahun 2005-2025 yang setiap tahapannya memiliki strategi dengan prioritas pembangunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1 Tahap RPJPD Provinsi Banten 2005 – 2025

TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RPJPD 2005-2025 PROVINSI BANTEN														
	RPJMD Ke-1 (2005-2007)			RPJMD Ke-2 (2008-20012)			RPJMD Ke-3 (2013-2017)			RPJMD Ke-4 (2018-2022)			RPJMD Ke-5 (2023-2025)	
	Tahap Revitalisasi-I			Tahap Revitalisasi-II			Tahap Akselerasi-I			Tahap Akselerasi-II			Tahap Modernisasi	
1	Peningkatan Cakupan Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;		1	.Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;		1	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;		1	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;		1	Peningkatan Kesejahteraan Sosial ;	
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;		2	Penanggulangan Kemiskinan,		2	Pemantapan Kualitas Sumber		2	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya		2	Pemantapan Daya Saing Sumber Daya	
3	PeningkatanPertumbu han Perekonomian;		3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;		3	Pemantapan Kualitas dan Pemerataan Perekonomian;		3	Peningkatan Daya Saing Perekonomian;		3	Pemantapan Daya Saing Perekonomian;	

	RPJMD Ke-1 (2005-2007)	RPJMD Ke-2 (2008-20012)	RPJMD Ke-3 (2013-2017)	RPJMD Ke-4 (2018-2022)	RPJMD Ke-5 (2023-2025)
	Tahap Revitalisasi-I	Tahap Revitalisasi-II	Tahap Akselerasi-I	Tahap Akselerasi-II	Tahap Modernisasi
4	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;	4 Pemulihan dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;	4 Pemantapan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Wilayah;	4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana wilayah;	4 Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
5	Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan	5 Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan	5 Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan	5 Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;	5 Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
7	Perencanaan dan Penataan Pelabuhan- Pelabuhan Lokal, Nasional, dan	7 Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis;.	7 Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.	7 Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat	7 Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Sebagaimana tabel 6.2 Uraian Tujuan, Sasaran dan Strategi dan sebagaimana tabel 6.3 Uraian Arah Kebijakan setiap tahun (terlampir)

Tabel 6.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Banten

Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

Misi : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)					
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
1.1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	1.1.1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1.01	Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah
				1.02	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
				1.03	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
				1.04	Meningkatkan akses keuangan daerah
				1.05	Meningkatkan akses perekonomian masyarakat
				1.06	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah
				1.07	Meningkatkan akses infrastruktur bagi masyarakat
				1.08	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
				1.09	Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan
				1.10	Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan
				1.11	Meningkatkan kualitas pelayanan secretariat daerah
		1.1.2	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	1.12	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan
		1.1.3	Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari korupsi	1.13	Meningkatkan Leveling Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
				1.14	Meningkatkan Maturiras SPIP
				1.15	Meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
				1.16	Meningkatnya Nilai SAKIP
				1.17	Meningkatkan dan Mempertahankan Opini Laporan Keuangan

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
		1.1.4	Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	1.18	Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi
				1.19	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100%
		1.1.5	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	1.20	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
				1.21	Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi pembangunan daerah
		1.1.6	Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	1.22	Meningkatkan kualitas Penelitian
		1.1.7	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	1.23	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur
		1.1.8	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	1.24	Meningkatkan kompetensi aparatur
		1.1.9	Pendapatan Daerah yang Optimal	1.25	Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah
		1.1.10	Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	1.26	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah
		1.1.11	Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	1.27	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan
				1.28	Meningkatkan keamanan dan stabiitas daerah
		1.1.12	Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	1.29	Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana
				1.30	Meningkatkan Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana
				1.31	Meningkatkan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana
		1.1.13	Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	1.32	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
		1.1.14	Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1.33	Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
		1.1.15	Pelayanan Publik Yang berkualitas	1.34	Meningkatkan Fasilitas, Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan
Misi : 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur					
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
2.1	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	2.1.1	Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas	2.01	Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan
				2.02	Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jembatan
				2.03	Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi
		2.1.2	Perencanaan dan Penataan ruang yang berkualitas	2.04	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang
				2.05	Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman
		2.1.3	Tersedianya Perumahan dan Pemukiman yang layak. Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, Pengelolaan Sampah regional	2.06	Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu
				2.07	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
				2.08	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan
		2.1.4	Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan lalu lintas	2.09	Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas
				2.10	Meningkatkan sarana dan prasarana kelengkapan jalan
		2.1.5	Penanggulangan Banjir dan Abrasi, serta Ketersediaan Air Baku	2.11	Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir
				2.12	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku
				2.13	Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi
		2.1.6	Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	2.14	meningkatkan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi
		2.1.7	kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	2.15	Penyusunan Regulasi dan Pedoman Standar Pelayanan Transportasi

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
				2.16	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
Misi : 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas					
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
3.1	Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing	3.1.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01	Meningkatkan Akses Pendidikan dan penyediaan biaya operasional sekolah Menengah
				3.02	Meningkatkan Mutu Pendidikan dan penyediaan biaya operasional sekolah Khusus
		3.1.2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	3.03	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan
		3.1.3	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	3.04	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas
				3.05	Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event
		3.1.4	Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) yang berkualitas	3.06	Meningkatkan pengarusutamaan gender pada semua sektor
				3.07	Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
		3.1.5	Minat Baca Masyarakat yang meningkat	3.08	Meningkatkan Minat Baca masyarakat dengan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
		3.1.6	Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	3.09	Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal
Misi : 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas					
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
4.1	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	4.1.1	Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	4.01	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga
		4.1.2	Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	4.02	Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat
		4.1.3	Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	4.03	Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan
		4.1.4	Laju Pertumbuhan Penduduk yang terkendali	4.04	Meningkatkan Pengendalian Penduduk

Misi : 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi					
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
5.1	Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	5.1.1	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	5.01	Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi Potensi investasi
				5.02	Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat
		5.1.2	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	5.03	Meningkatkan pengembangan sektor industri
		5.1.3	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	5.04	Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan strategis
				5.05	Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah
				5.06	Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal
		5.1.4	Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	5.07	Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan dan perikanan
		5.1.5	Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	5.08	Meningkatkan ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan, mengoptimalkan Sumberdaya Pangan, Cadangan Pangan dan Distribusi Pangan serta kestabilan harga pangan
		5.1.6	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	5.09	Meningkatkan jumlah Kunjungan Wisatawan melalui Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Produk Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan menggunakan teknologi informasi
		5.1.7	Kelembagaan Koperasi yang aktif dan sehat	5.10	Meningkatkan koperasi aktif melalui penataan kelembagaan dan pengawasan,Pemberdayaan Koperasi, kemitraan strategis, pemanfaatan teknologi informasi
		5.1.8	Koperasi dan Usaha Kecil yang berdaya	5.11	Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
		5.1.9	Menurunnya PMKS	5.12	meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
		5.1.10	Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	5.13	Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT
		5.1.11	Pengendalian, pengawasan dan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	5.14	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara
		5.1.12	Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri	5.15	Mengurangi jumlah desa tertinggal
		5.1.13	Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat	5.16	Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja
				5.17	meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
				5.18	meningkatkan jaminan ketenagakerjaan
		5.1.14	Lingkungan Hidup yang berkualitas	5.19	Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup
		5.1.15	Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	5.2	Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung
		5.1.16	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	5.21	Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai
				5.22	Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan
Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
Peningkatan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan	Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan
Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi	Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat	Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD
Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Pembangunan Bendung, empang dan situ	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan	Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir
Pembangunan Bendung, empang dan situ	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Pembangunan Bendung, empang dan situ	Peningkatan Capaian Leveling APIP	Pembangunan Bendung, empang dan situ
Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Pembangunan TPST Regional	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan Sumber daya manusia	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi	Peningkatan Sumber Daya Badan Usaha Jasa Konstruksi	Peningkatan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Pembangunan TPST Regional	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Peningkatan Kualitas Analisis kebutuhan Penelitian	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Peningkatan Kualitas Pelayanan data dan Informasi berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi
penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Pembangunan TPST Regional	Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi	Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan
Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan Pemanfaatan teknologi Informasi	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	Peningkatan koordinasi penanggulangan kebencanaan	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
	Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan	Peningkatan Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana	Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan
	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	Peningkatan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana	Pengembangan perwilayahan Industri melalui pembentukan sentra industri Kecil pada kawasan dan luar kawasan industri
	memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk tertib administrasi Kependudukan	Pengembangan kualitas produk industri kecil
		Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga	Peningkatan Capaian Nilai SAKIP	Peningkatkan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis
		Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan penerapan teknologi informasi	Peningkatan Capaian Maturasi SPIP	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)
		Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	Peningkatan Capaian Opini Laporan Keuangan	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah	Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata
		Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat
		Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan pembiayaan bagi koperasi aktif
		Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Revitalisasi museum, pengembangan taman budaya	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan
		Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan
		Pengembangan kualitas produk industri kecil	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang geologi dan minerba
		Peningkatkan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis	Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, kelembagaan dan akreditasi serta pembinaan produktifitas

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
		Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah
		Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)	Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi	Peningkatan Konservasi Daerah Aliran Sungai
		Peningkatan Ketersediaan Pangan yang di dukung oleh Infrastruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah	Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
		Peningkatan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	
		Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	
		Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk	
		Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku	
		Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat	Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
		Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	
		memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	
			Pengembangan kualitas produk industri kecil	
			Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen	
			Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)	
			Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan	
			Peningkatan Ketersediaan Pangan yang di dukung oleh Infrastruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah	
			Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
			Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata	
			Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat	
			Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan pembiayaan bagi koperasi aktif	
			Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	
			Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan	
			Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan	
			Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang geologi dan minerba	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
			Peningkatkan Penataan, pembinaan dan pengembangan Desa melalui Penataan dan Pembinaan Desa Adat serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa	
			Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, kelembagaan dan akreditasi serta pembinaan produktifitas	
			Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	
			memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	
			Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah	
			Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	

6.2.1 ARAH KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten Sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional Yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang Mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, Dan Pariwisata.

Lingkup Wilayah Provinsi Banten merupakan wilayah Daerah seluas 966.292 (sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh) hektar yang terdiri atas :

- a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon; dan
- c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Adapun arahan fungsi dan peranan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) meliputi:

- a. WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
- b. WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan; dan
- c. WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri, perkebunan dan pendidikan.

Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang, kebijakan pengembangan pola ruang, serta kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten.

6.2.1.1. Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten meliputi:

- a. Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten dan lintas kabupaten/kota;

- b. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.
2. Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten
- Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten meliputi:
- a. Strategi peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten, meliputi:
 - 1) Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
 - 2) Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya;
 - 3) Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);
 - 4) Mewujudkan pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan (PKWp) pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
 - b. Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten, meliputi:
 - 1) Meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
 - 2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - 3) Mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai utara;
 - 4) Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

- 5) Mengembangkan pusat penyebaran primer pelabuhan internasional bojonegara yang didukung dengan berfungsinya kawasan-kawasan strategis provinsi dan jaringan jalan cincin Provinsi Banten;
 - 6) Mewujudkan jembatan selat sunda sebagai jalur transportasi nasional penghubung jawa – sumatera yang terhubung dengan sistem jaringan jalan nasional lintas utara, tengah, dan selatan pulau jawa di wilayah Provinsi Banten.
- c. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten, meliputi:
- 1) Meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - 2) Meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
 - 3) Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut;
 - 4) Mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - 6) Mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur, penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Tangerang (Jabodetabekpunjur), pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta, tertatanya sistem jaringan energi, minyak dan gas alam, pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman;
 - 7) Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;

- 8) Mewujudkan pemanfaatan kawasan Selat Sunda secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan

3. Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten

Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten meliputi sistem perkotaan, sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan di Provinsi Banten didasarkan atas cakupan wilayah pelayanan.

Rencana sistem perkotaan meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri dari :
 - Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Selatan;
 - Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Serang; dan
 - Kawasan Perkotaan Cilegon.
- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi Kawasan Perkotaan Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung;
- 3) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) meliputi Kawasan Panimbang, Kawasan Bayah, dan Kawasan Maja; dan
- 4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas dan Kawasan Cikeuruh Wetan.

b. Rencana sistem prasarana utama

Rencana sistem prasarana utama Provinsi Banten terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air

1) sistem jaringan transportasi

Sistem jaringan transportasi terdiri dari pengembangan sistem jaringan transportasi darat, pengembangan sistem jaringan transportasi laut dan pengembangan sistem jaringan transportasi udara

Adapun rencana pengembangan sistem transportasi darat di provinsi Banten adalah

a) Pengembangan jaringan jalan nasional meliputi jaringan jalan arteri primer, kolektor primer dan jalan tol melalui :

- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer di Daerah meliputi : Jln. Raya Merak (Cilegon), Jln. Raya Cilegon (Cilegon), Jln. Raya Serang (Cilegon), Jln. Raya Cilegon (Serang), Jln. Letnan Jidun (Serang), Jln. Tb. Suwandi (Serang), Jln. Abdul Hadi (Serang), Jln Kh. Abdul Fatah Hasan (Serang), Jln. Sudirman (Serang), Jln. Raya Serang (Tangerang), Jln. Otista (Tangerang), Jln. Ks. Tubun (Tangerang), Jln. Daan Mogot (Tangerang - Bts. DKI)
- (2) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer di Daerah meliputi Jln. Raya Anyer (Cilegon), Pasauran – Labuhan, Jl. A. Yani (Labuhan, Labuhan - Sp. Labuhan, Simp. Labuhan – Saketi, Cigadung - Cipacung Jln. By Pass Rangkasbitung (Jln. Soekarno Hatta Rangkasbitung), Jln. Raya Cipanas (Rangkasbitung) , SpLabuan – Cibaliung, Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangen ,Muara Binuangeun – Simpang, Simpang – Bayah, Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar, Jln. Raya Pandeglang (Serang) Jln. Raya Serang (Pandeglang) Bts.DKI Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor), Jln. Rambutan (Ciputat), Jln. Otista (Ciputat) Jln. Akses Tol Merak, Cikande – Rangkasbitung, Jln. Raya Cikande (Jln. Otto Iskandardinata Rangkasbitung) ,Cibaliung - Sumur, Citereup - Tanjung Lesung, Serdang - Bojonegara – Merak.
- (3) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Daerah meliputi:
 - Jakarta – Tangerang dan Jakarta – Tangerang Elevated;
 - Prof. Dr. Sedyatmo dan Prof. Dr. Sedyatmo Elevated;
 - Pondok Aren – Serpong;

- Pondok Aren – Ulujami;
 - Serpong – Balaraja;
 - Semanan – Sunter;
 - Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper;
 - Jakarta Outer Ring Road II yang meliputi Cengkareng
 - Batu Ceper – Kunciran, Kunciran – Serpong,
 - Serpong - Cinere
 - Bojong Gede – Balaraja.
- (4) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di daerah meliputi:
- Tangerang – Merak;
 - Cilegon – Bojonegara;
 - Serang – Panimbang;
 - Semanan – Rajeg – Balaraja; dan
 - Kamal – Teluk Naga – Rajeg.
- (5) Rencana Pengembangan jalan nasional Bayah – Cibarenok – Batas Provinsi Jawa Barat , Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta, Serang – Pandeglang, Pangarangan – Bayah – batas Provinsi Jawa Barat, Simpang 3 (tiga) Cilegon, Simpang 3 (tiga) Labuan, Simpang 3 (tiga) Tarogong;; Merak – Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – batas Provinsi Jawa Barat.
- (6) Rencana Pembangunan jalan nasional, Jalan Cikande – Serang – Cilegon, Cipanas - Warung banten- Bayah, Jalan Tanjung Lesung - Sumur dan jalan lintas selatan Banten
- (7) Pengawasan dan pengendalian jalan nasional berupa jembatan timbang berlokasi di:
- Cikande Kabupaten Serang; dan
 - Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
- (8) Rencana Pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh Wilayah Provinsi Banten;

- (9) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan
 - (10) Rencana pembangunan jalan prospektif di wilayah Provinsi Banten
- b) Pengembangan jaringan jalan provinsi meliputi:
- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi meliputi : Pakupatan – Palima, Palima - Pasar Teneng, Ciruas - Petir - Wr.Gunung, Lopang - Banten Lama, Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu, Jl. Trip Jamaksari, Jl. Ayip Usman, Jl. A. Yani (Serang), Jl. Veteran, Jl. KH. Syam'un, Jl. Mayor Safei (Serang), Jl. Raya Cilegon (Serang), Jl. TB. A Katib (Serang), Jl. Yusuf Martadilaga (Serang), Sempu - Dukuh Kawung, Simpang Taktakan - Gn. Sari, Gn. Sari - Mancak – Anyer, Kramatwatu – Tonjong, Ciruas – Pontang, Parigi – Sukamanah, Ciomas – Mandalawangi, Jalan Yasin Beji, Jalan Raya Industri, Terate - Banten Lama, Banten Lama – Pontang, Pontang – Kronjo, Kronjo – Mauk, Mauk - Teluk Naga, Teluk Naga – Dadap, Citeras – Tigaraksa, Tigaraksa – Malangnengah, Sp.Bitung – Curug, Curug - Legok - Parung Panjang, Cisauk – Jaha, Jl.Beringin Raya, Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman), Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang, Jl. Raden Fatah (Ciledug), Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari), Jl.Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto), Jl. Serpong Raya, Jl. Pahlawan Seribu, Jl. Serpong Parung, Jl. Aria Putra (Ciputat), Jl. Raya Jombang., Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat), Jl. H. Usman (Ciputat), Jl. Pajajaran (Ciputat), Jl. Siliwangi, Jl. Puspitek Raya, Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi, Jl. Cabe Raya - Cireunde Raya, Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang), Jl. A. Yani (Pandeglang), Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang), Jl. Abdul Rahim (Pandeglang), Jl. Raya Labuan (Pandeglang), Jl. Widagdo (Pandeglang), Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang), Tanjung Lesung – Sumur,

Mengger-Mandalawangi-Caringin, Saketi – Ciandur, Picung – Munjul, Munjul – Panimbang, Cisekeut – Sobang – Tela, Munjul-Cikaludan-Cikeusik, Jl. Sudirman (Labuan), Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan), Maja – Koleang, Saketi – Malingping – Simpang, Cipanas – Warung Banten, Bayah – Cikotok, Cikotok – Bts Jabar, Gunung Madur – Pulau Manuk, Jl. A. Yani (Rangkasbitung), Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung), Sp. Gading Serpong – Serenade – Kebon Nanas.

- (2) Rencana pembangunan jalan dari Gerbang Tol Serang Timur – Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta;
- (4) Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
- (5) Jaringan jalan provinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara PKN dengan PKW dan antar PKW;
- (6) Rencana pembangunan akses tol/interchange, jalan lingkar, simpang sebidang, underpass, flyover, frontage yang berada di jalan kewenangan provinsi diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.; dan
- (7) Pembangunan, peningkatan dan penetapan status untuk menjadi jalan provinsi diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

c) Pengembangan terminal

- (1) Dukungan untuk Pengembangan terminal penumpang tipe A dalam wilayah provinsi meliputi: Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A meliputi:
 - Terminal Merak yaitu Kawasan Terminal Terpadu Merak – Kota Cilegon;
 - Terminal Pakupatan di Kota Serang;

- Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang;
 - Terminal Kadubanen di Kabupaten Pandeglang;
 - Terminal Kadu Agung Mandala/Mandala di Kabupaten Lebak;
 - Terminal Balaraja di Kabupaten Tangerang;
 - Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan;
 - Terminal Labuan di Kabupaten Pandeglang; dan
 - Terminal Malingping di Kabupaten Lebak.
- (2) Pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi meliputi:
- Terminal Pasar Badak Pandeglang di Kabupaten Pandeglang;
 - Terminal Bayah di Kabupaten Lebak;
 - Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan;
 - Terminal Cadas, Jatiuwung di Kota Tangerang;
 - Terminal Ciledug di Kota Tangerang;
 - Terminal Cibeber/Seruni di Kota Cilegon; dan
 - Terminal Tanara di Kabupaten Serang.
- (3) Rencana pembangunan terminal tipe B di Palima Kota Serang;
- d) Pengembangan jaringan kereta api
- Dukungan Pengembangan jaringan kereta api terdiri dari jaringan jalur kereta api umum, jaringan jalur kereta api khusus, serta stasiun kereta api. Pengembangan jaringan kereta api di Provinsi Banten meliputi:
- (1) Pengembangan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan kawasan-kawasan industri, simpul-simpul transportasi utama yaitu pembangunan jaringan prasarana baru pada lintas:
- Tonjong Baru – Pelabuhan Bojonegara;
 - Serpong – Tangerang – Bandara Soekarno Hatta;
 - Serang – Cikande – Cikupa – Serpong;
 - Bandara Soekarno Hatta – Pluit – Kota; dan
 - Rencana pembangunan jalur kereta api Bojonegara – Pantura – Tanjung Priuk;

- (2) Pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada Lintas Parung Panjang – Serpong – Citayam – Nambo – Cikarang; Lintas Serang – sepadan tol – Balaraja, Lintas Balaraja – Jakarta – Cikarang;
- (3) Pengembangan angkutan perkotaan terutama pada Lintas Tangerang – Duri, dan Lintas Merak – Cilegon – Serang – Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang;
- (4) Pengembangan jalur ganda kereta api Jakarta – Kota Tangerang;
- (5) Pengembangan trayek kereta api khusus lintas Tanah Abang – Cilegon, Tanah Abang – Cigading dan jaringan jalur kereta api khusus pada kawasan industri;
- (6) Pengembangan stasiun kereta api terpadu pada kawasan Terminal Merak, kawasan Bojonegara, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kawasan Bandar Udara Banten Selatan, dan Kawasan Bumi Serpong Damai;
- (7) Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi antara Maja – Rangkasbitung – Merak;
- (8) Pembangunan lintas baru Cilegon – Anyer Kidul – Labuan – Panimbang;
- (9) Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan di kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung;
- (10) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada lintas Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta;
- (11) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang, dan Lintas Tangerang – Duri;
- (12) Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi;

- (13) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana untuk Stasiun Merak di Kota Cilegon, Stasiun Krenceng, di Kota Cilegon, Stasiun Serang di Kota Serang, Stasiun Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Stasiun Pasar Anyar di Kota Tangerang, Stasiun Serpong di Kota Tangerang Selatan dan Stasiun Maja di Kabupaten Lebak;
- (14) Rencana pengembangan dan pembangunan stasiun kereta api diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (15) Pengaktifan kembali jalur kereta api lintas Ciwandan – Anyer Kidul, Rangkasbitung – Saketi – Labuan, Saketi – Malingping – Bayah;
- (16) Perbaikan jaringan kereta api Rangkasbitung – Saketi – Malingping – Bayah dan jaringan kereta api Saketi – Labuan;
- (17) Rencana Pengembangan Jalur KA lintasan Panimbang – Cibaliung – Malingping;
- (18) Rencana pembangunan jalur KA Merak – Bandara Soekarno Hatta;
- (19) Rencana pembangunan Dryport di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;
- (20) Pengembangan angkutan massal terpadu berbasis rel Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung dan Jalur MRT lintas Batuceper-Serpong;
- (21) Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah timur ke wilayah barat yaitu Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang;
- (22) Pengembangan transportasi cepat terpadu berbasis rel di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- (23) Rencana pembangunan Transit Oriented Development /TOD di seluruh Provinsi Banten
- (24) Rencana pengembangan angkutan massal berbasis rel dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta; dan
- (25) Rencana pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel di seluruh Provinsi Banten

- e) Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Banten meliputi :

- (1) Rencana pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni, yaitu:
 - Cituis – Kepulauan Seribu, Tanjungkait – Kepulauan Seribu, Tanjungpasir – Kepulauan Seribu, Dadap – Kepulauan Seribu;
 - Karangantu – Pulau Tunda, Grenjang – Pulau Panjang;
 - Sumur – Pulau Panaitan, Muarabinuangeun – Pulau Deli;
 - Labuan – Pulau Sangiang; dan
 - Merak – Kepulauan Anak Gunung Krakatau.
- (2) Rencana Pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;
- (3) Rencana Pengembangan angkutan danau/waduk pada danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;
- (4) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- (5) Rencana pengembangan angkutan perintis pada daerah terpencil dan atau terisolir
- (6) Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai Pelabuhan Pengumpan yang meliputi :
Pelabuhan Panimbang, Bojongmanik, Pontang, Tirtayasa, Carenang, Kragilan, Cikande, Kasemen, Cihara, Pakuhaji dan Sepatan.

- f) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut di Provinsi Banten meliputi:

- (1) Rencana Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Peti Kemas Bojonegara di Kabupaten Serang;

- (2) Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Warnasari di Kota Cilegon;
 - (3) Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu Pelabuhan Anyer Lor dan Pelabuhan Labuan, dan Pelabuhan Karangantu
 - (4) Rencana Pengembangan Lokasi Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan Lokal di Cituis dan Kresek/Kronjo;
 - (5) Rencana pengembangan Pelabuhan Cigading sebagai Terminal Umum Multipurpose KBS Cigading dan sebagai pelabuhan pengumpul di Kota Cilegon;
 - (6) Rencana Pengembangan terminal khusus di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian, dan pertambangan;
 - (7) Rencana Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir;
 - (8) Rencana pembangunan pelabuhan regional multifungsi di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.
- 2) Rencana pengembangan sistem jaringan energi
- Rencana pengembangan sistem jaringan energi di Provinsi Banten meliputi :
- a) rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik;
 - (1) Rencana Pengembangan dan Pembangunan PLTU meliputi :
 - PLTU Labuan 1-2 di Kabupaten Pandeglang
 - PLTU Suralaya 1-8 di Kota Cilegon
 - PLTU Lontar 1-3 di Kabupaten Tangerang
 - PLTU Banten di Kabupaten Serang
 - PLTU Jawa-7 di Kramatwatu Kabupaten Serang
 - PLTU Lontar 4 di Kabupaten Tangerang
 - PLTU Jawa 9 di Kabupaten Serang

- PLTU Jawa 6 di Kabupaten Serang⁶ atau indikasi lokasi di PLTU Suralaya ^{9,10}
 - PLTU Jawa-5 di Kabupaten Tangerang
- (2) Rencana Pengembangan PLTM meliputi:
- PLTM Cikotok di Kabupaten Lebak
 - PLTM Bojong Cisono di Kabupaten Lebak
 - PLTM Bulakan di Kabupaten Serang
 - PLTM Cisimeut di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cidanau di Kabupaten Serang
 - PLTM Cikidang di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cisungsang II di Kabupaten Lebak
 - PLTM Karang Ropong (Cibareno 1) di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cibareno di Kabupaten Lebak
 - PLTM Pasundan di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cisihih Mandiri di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cisihih Leutik di Kabupaten Lebak
 - PLTM Nagajaya di Kabupaten Lebak
- (3) Rencana Pengembangan PLTB meliputi :
- PLTB Pandeglang di Kabupaten Pandeglang
 - PLTB Lebak di kabupaten Lebak
- (4) Rencana Pengembangan PLTGU meliputi :
- PLTGU/MG Jawa-Bali 3 di Kabupaten Serang
 - PLTGU Jawa-4 Bojonegara di Kabupaten Serang
 - PLTGU Cilegon di Kota Cilegon
- (5) Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dalam melayani kebutuhan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil di PLTD Pulau Panjang dan PLTD Pulau Tunda;
- (6) Rencana Pengembangan PLTP Rawa Danau di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dan PLTP di G. Endut Kabupaten Lebak;
- (7) Rencana pengembangan Energi Baru Terbarukan/EBT berupa Energi Hidro dan Biomassa di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.
- (8) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di wilayah Provinsi Banten

- (9) Rencana pembangunan tenaga listrik tenaga matahari di seluruh wilayah Provinsi Banten; dan
 - (10) Rencana pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Provinsi Banten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik
- Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Provinsi Banten meliputi :
- (1) Rencana pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - (2) Rencana pengembangan sistem distribusi jaringan tegangan rendah;
 - (3) Rencana pengembangan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi; dan
 - (4) Rencana pengembangan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa
- 3) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi
- Arahan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Banten, yaitu pengembangan sistem jaringan telekomunikasi hingga mencapai pelosok wilayah, yang meliputi:
- Rencana Pembangunan serat optik antar kabupaten/kota; dan
 - Rencana Pengembangan transmisi penyiaran
- Selain rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi juga dilakukan pengendalian pembangunan menara Base Transceiver Station untuk keterpaduan penggunaan tower bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air
- Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Provinsi diarahkan untuk mendukung air baku dengan

mengoptimalkan peruntukan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

a) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya di Provinsi, meliputi:

- (1) Rencana pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;
- (2) Rencana pembangunan Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang dan Kota Serang;
- (3) Rencana pengembangan Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang;
- (4) Rencana pengembangan Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Pandeglang;
- (5) Rencana pengembangan Bendung Ciliman di Kabupaten Pandeglang;
- (6) Rencana pengembangan Bendung Cibaliung di Kabupaten Pandeglang;
- (7) Rencana pengembangan Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang;
- (8) Rencana pengembangan Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang;
- (9) Rencana pengembangan Bendung Pasar Baru di Kota Tangerang;
- (10) Rencana pengembangan Pengembangan Bendung Cisadane Pintu Sepuluh di Kota Tangerang;
- (11) Rencana pemeliharaan CAT Rawa Danau di Serang-Pandeglang;
- (12) Rencana pemeliharaan CAT Serang-Tangerang;
- (13) Rencana pemeliharaan CAT Labuan di Kabupaten Pandeglang ;
- (14) Rencana pemeliharaan CAT Malingping di Kabupaten Lebak;
- (15) Rencana pemeliharaan CAT Jakarta di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang selatan;
- (16) Rencana pengendalian pemanfaatan ruang situ, waduk, danau, dan rawa yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten

Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon dan Kota Serang sebagai kolam penyimpanan;

- (17) Rencana pengembangan Bendungan eks Teluk Lada di Kabupaten Pandeglang
- (18) Rencana pengembangan Bendungan Citeluk di Kabupaten Pandeglang
- (19) Rencana pengembangan sumber air baku dari aliran sungai di Daerah dengan mempertimbangkan daya dukung sumberdaya air;
- (20) Rencana pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Waduk Karian
- (21) Rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Provinsi Banten; dan
- (22) Rencana pemanfaatan air laut sebagai sumber air bersih di seluruh wilayah Provinsi Banten

b) Rencana pengembangan sistem Irigasi di Provinsi, yaitu :

- (1) Pengelolaan daerah irigasi di Daerah diarahkan untuk kebutuhan pertanian di wilayah Provinsi Banten;
- (2) Rencana Pembangunan atau peningkatan Jaringan Irigasi yang dilintasi Sungai Cisadane Ciliman dan Cibaliung.
- (3) Rencana Peningkatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi Eks Teluk Lada di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.
- (4) Rehabilitasi Daerah Irigasi yang dilintasi Sungai Ciujung, Cisadane dan Cidurian.
- (5) Rencana Pembangunan Irigasi yang dilintasi Sungai Ciseukuet, Cikaduan, Cipatujah dan Caringin

c) Pengelolaan sumberdaya air lintas batas administrasi Daerah dan pemerintah kabupaten, meliputi

- (1) Wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi:
 - Cidanau – Ciujung – Cidurian; dan
 - Ciliwung – Cisadane;
- (2) Wilayah sungai lintas kabupaten yang meliputi:
 - Ciliman – Cibungur; dan

- Cibaliung – Cisawarna.

c. Rencana sistem prasarana lainnya

1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan ruang untuk TPAS dan/atau TPST. Adapun TPST di Provinsi Banten dikembangkan menjadi TPST Regional, yang berada di:

- Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I;
- Kabupaten Serang untuk melayani WKP II; dan
- Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III

Selain penyediaan ruang untuk TPAS dan/atau TPST regional juga mendukung percepatan proyek strategis nasional yaitu pembangunan infrastruktur energi asal sampah di seluruh kabupaten/kota

2) Rencana pembangunan Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Petir Kabupaten Serang

Tabel 6.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Provinsi Banten

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)							
I.1	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	a. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi : Perkotaan Kota Tangerang, Perkotaan Kota Tangerang Selatan, dan Perkotaan Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*
I.2	Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan melalui peningkatan fungsi	d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Kawasan Perkotaan Serang (Kota Serang dan Kabupaten Serang)	*	*	*	*	*
			Kawasan Perkotaan Cilegon	*	*	*	*	*
I.3	Mendorong Pengembangan Kota-Kota sentra produksi	a. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen f. Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Kawasan Perkotaan Pandeglang	*	*	*	*	*
II	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)							
II.1	Mendorong Pengembangan Kota-Kota sentra produksi	a. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Kawasan Perkotaan Pandeglang Kawasan Perkotaan Rangkasbitung	*	*	*	*	*
				*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		f. Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil						
III	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)							
III.1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas, dan Kawasan Cikeuruh Wetan	*	*	*	*	*
IV	Pengembangan jaringan jalan provinsi							
IV.1	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi	a. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur b. Program Penataan Ruang	Pakupatan – Palima, Palima - Pasang Teneng, Ciruas - Petir - Wr.Gunung, Lopang - Banten Lama, Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu, Jl. Trip Jamaksari, Jl. Ayip Usman, Jl. A. Yani (Serang), Jl. Veteran, Jl. KH. Syam'un, Jl. Mayor Safei (Serang), Jl. Raya Cilegon (Serang), Jl. TB. A Katib (Serang), Jl. Yusuf Martadilaga (Serang), Sempu - Dukuh Kawung, Simpang Taktakan - Gn. Sari, Gn. Sari - Mancak - Anyer, Kramatwatu - Tonjong, Ciruas - Pontang, Parigi - Sukamanah, Ciomas - Mandalawangi, Jalan Yasin Beji, Jalan Raya Industri, Terate - Banten Lama, Banten Lama - Pontang, Pontang - Kronjo, Kronjo - Mauk, Mauk - Teluk Naga, Teluk Naga - Dadap, Citeras - Tigaraksa, Tigaraksa	*	*	*		

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			– Malangnengah, Sp.Bitung – Curug, Curug - Legok - Parung Panjang, Cisauk – Jaha, Jl.Beringin Raya, Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman), Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang, Jl. Raden Fatah (Ciledug), Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari), Jl.Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto), Jl. Serpong Raya, Jl. Pahlawan Seribu, Jl. Serpong Parung, Jl. Aria Putra (Ciputat), Jl. Raya Jombang, Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat), Jl. H. Usman (Ciputat), Jl. Pajajaran (Ciputat), Jl. Siliwangi, Jl. Puspitek Raya, Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi, Jl. Cabe Raya - Cireunde Raya, Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang), Jl. A. Yani (Pandeglang), Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang), Jl. Abdul Rahim (Pandeglang), Jl. Raya Labuan (Pandeglang), Jl. Widagdo (Pandeglang), Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang), Tanjung Lesung – Sumur, Mengger-Mandalawangi-Caringin, Saketi – Ciandur, Picung – Munjul, Munjul - Panimbang, Cisekeut - Sobang – Tela, Munjul-Cikaludan-Cikeusik, Jl. Sudirman (Labuan), Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan), Maja – Koleang, Saketi - Malingping - Simpang , Cipanas - Warung Banten, Bayah – Cikotok, Cikotok - Bts Jabar, Gunung Madur - Pulau Manuk, Jl. A. Yani (Rangkasbitung), Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung), Sp. Gading Serpong - Serenade - Kebon Nanas					

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IV.2	Rencana pembangunan jalan dari Gerbang Tol Serang Timur – Kawasan Pusat Pemerintahan		Kota Serang	*	*	*		
IV.3	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Provinsi Banten			*	*	*
IV.4	Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten		Provinsi Banten			*	*	*
IV.5	Jaringan jalan provinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara PKN dengan PKW dan antar PKW	a. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur b. Program Penataan Ruang	Provinsi Banten	*	*	*		
IV.6	Rencana pembangunan akses tol/interchange, jalan lingkar, simpang sebidang, underpass, flyover, frontage yang berada di jalan kewenangan provinsi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IV.7	Pembangunan, peningkatan dan penetapan status untuk menjadi jalan provinsi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V	Pengembangan terminal							
V.1	Pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota/pedesaan		Terminal Pasar Badak Pandeglang di Kabupaten Pandeglang, Terminal Bayah di Kabupaten Lebak, Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan, Terminal Cadas, Jatiuwung di Kota Tangerang, Terminal Ciledug di Kota Tangerang, Terminal Cibeber/Seruni di Kota Cilegon, Terminal Tanara di Kabupaten Serang				*	*
V.2	Rencana pembangunan terminal tipe B		Palima Kota Serang				*	*
V.3	Rencana pembangunan terminal Pusat Distribusi Provinsi/Regional	a. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan b. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	*	*	*		

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VI	Pengembangan jaringan kereta api				*	*	*	*
VI.1	Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi		Maja – Rangkasbitung – Merak		*	*	*	*
VI.2	Pembangunan lintas baru		Cilegon – Anyer Kidul – Labuan – Panimbang		*	*	*	*
VI.3	Pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota		Kereta Api Express SHIA jalur Soekarno Hatta – Sudirman		*	*	*	*
VI.4	Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan di kawasan perkotaan jalur kereta api		Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung		*	*	*	*
VI.5	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api		Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta		*	*	*	*
VI.6	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan		Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang, dan Lintas Tangerang – Duri		*	*	*	*
VI.7	Rencana pengembangan dan pembangunan stasiun kereta api		Provinsi Banten		*	*	*	*
VI.8	Pengaktifan kembali jalur kereta api		Ciwandan – Anyer Kidul, Rangkasbitung – Saketi – Labuan, Saketi – Malingping – Bayah		*	*	*	*
VI.9	Perbaikan jaringan kereta api		Rangkasbitung – Saketi – Malingping – Bayah dan jaringan kereta api Saketi – Labuan		*	*	*	*
VI.10	Rencana Pengembangan Jalur KA		Panimbang – Cibaliung – Malingping		*	*	*	*
VI.11	Rencana pembangunan jalur KA		Merak – Bandara Soekarno Hatta		*	*	*	*
VI.12	Pengembangan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel		Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung dan Jalur MRT lintas Batuceper-Serpong		*	*	*	*
VI.13	Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah timur ke wilayah barat		Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang		*	*	*	*
VI.14	Pengembangan transportasi cepat terpadu berbasis rel		Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan		*	*	*	*
VI.15	Rencana pembangunan Transit Oriented Development /TOD		Provinsi Banten		*	*	*	*
VI.16	Rencana pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel		Provinsi Banten		*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VII	Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan							
VII.1	Rencana Pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.2	Rencana Pengembangan angkutan danau/waduk pada danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.3	Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.4	Rencana pengembangan angkutan perintis pada daerah terpencil dan atau terisolir		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.5	Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai Pelabuhan Pengumpan		Pelabuhan Panimbang, Bojongmanik, Pontang, Tirtayasa, Carenang, Kragilan, Cikande, Kasemen, Cihara, Pakuhaji dan Sepatan	*	*	*	*	*
VIII	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut							
VIII.1	Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpul		Pelabuhan Karangantu	*	*	*	*	*
VIII.2	Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelabuhan Anyer Lor, dan Pelabuhan Labuan	*	*	*	*	*
VIII.3	Rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pelabuhan Bayah, Muarabinuangun, Panimbang, Genyang-Puloampel, Pasauran, Pulopanjang-Puloampel, Tanjung Leneng, Terate, Pulotunda-Tirtayasa, Lontar-Pontang, Muara Dadap	*	*	*	*	*
VIII.4	Rencana Pengembangan Lokasi Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan Lokal		Cituis dan Kresek/Kronjo	*	*	*	*	*
VIII.5	Rencana Pengembangan terminal khusus untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian, dan pertambangan	a. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan b. Program Pemberdayaan Ekonomi	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VIII.6	Rencana Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir	Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VIII.7	Rencana pembangunan pelabuhan regional multifungsi	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
IX	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara							
IX.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IX.2	Rencana pembangunan Bandara Udara		Panggarangan/Cihara dan Maja di Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
X	Rencana pengembangan sistem jaringan energi							
X.1	Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik PLTU, PLTM, PLTGU, PLTD, PLTP, EBT, PLTSa dan PLTS	Program Pengembangan, Pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.2	Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi							
X.3	Rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga	Program Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan geologi, air tanah, mineral dan batubara	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi							
XI.1	Pembangunan serat optik antar kabupaten/kota	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi Banten					
XI.2	Pengembangan transmisi penyiaran		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI.3	Pengembangan , pengendalian dan pembangunan menara Base Transceiver Station untuk keterpaduan penggunaan tower bersama		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XII	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air							

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
XII.1	Rencana pengembangan dan Pembangunan sistem jaringan sumber daya air Bendungan, CAT, Situ, Waduk, Danau, Rawa dan Kolam Penyimpanan	a. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur b. Program Penataan Ruang	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XII.2	Peningkatan Dan Pemeliharaan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI)		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XII.3	Pembangunan atau peningkatan jaringan Irigasi		Provinsi Banten	*	*	*		
XII.4	Peningkatan dan Pemeliharaan Rehabilitasi jaringan Irigasi Eks Teluk Lada		Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
XII.5	Rehabilitasi Daerah Irigasi		Ciujung, Cisdane, Cidurian	*	*	*	*	*
XII.6	Pembangunan Irigasi		Ciseukeut, Cikaduan, Cipatujah, Caringin	*	*	*		
XII.7	Pengelolaan Wilayah Sungai		WS Cidanau – Ciujung – Cidurian, WS Ciliwung – Cisdane, WS Ciliman – Cibungur, WS Cibaliung – Cisawarna	*	*	*	*	*
XIII	Perencanaan Dan Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya							
XIII.1	Pengembangan TPST Regional	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Penataan Ruang	Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I, Kabupaten Serang untuk melayani WKP II, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III	*	*	*		
XIII.2	Pembangunan infrastruktur energi asal sampah		di seluruh kabupaten/kota		*	*	*	*

6.2.1.2. Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten terdiri dari kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

1. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten
 - a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - 2) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
 - 3) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
 - 4) Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
 - b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:
 - 1) Peningkatan produktivitas kawasan budidaya;
 - 2) Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - 3) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - 4) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten
 - a. Strategi pengembangan kawasan lindung
 - 1) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya* meliputi:
 - a) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b) Meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi;
 - c) Mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi

perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.

- d) Mewujudkan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 - e) Mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung khususnya di wilayah banten selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional dalam rangka pengendalian perubahan iklim.
- 2) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup* meliputi:
- a) Menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b) Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.
- 3) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup*, meliputi:
- a) Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b) Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c) Meningkatkan kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - d) Mengendalikan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- f) Mewujudkan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 - g) Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- 4) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang*, meliputi:
- a) Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggiran sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
 - b) Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;
 - c) Mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan
 - d) Meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan kawasan perlindungan bawahnya.
- b. Strategi pengembangan kawasan budidaya
- 1) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *peningkatan produktivitas kawasan budidaya*, meliputi:
- a) Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;
 - b) Meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - c) Mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

- 2) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *Optimalisasi potensi sumberdaya alam dalam mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan*, meliputi:
 - a) Meningkatkan aksesibilitas pengembangan ekonomi di kawasan budidaya wilayah tertinggal
 - b) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan lokal perkotaan dan perdesaan
 - c) Meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir.
- 3) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya*, meliputi:
 - a) Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
 - b) Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c) Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan dalam mendukung perwujudan ketahanan sumberdaya alam;
 - d) Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
 - e) Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Provinsi Banten.
- 4) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan*, meliputi:

- a) Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- b) Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
- c) Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
- d) Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;

3 Rencana Pola Ruang Provinsi Banten

a. Pola ruang kawasan lindung

Pola ruang kawasan lindung di Provinsi terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Luas Pola ruang kawasan lindung lebih kurang 200.208,45 (dua ratus ribu dua ratus delapan empat lima) hektar.

- 1) Kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 10.387,29 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh dua sembilan) hektar berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah berupa kawasan resapan air. Kawasan resapan air berada pada:
 - a) Kabupaten Serang;
 - b) Kabupaten Pandeglang; dan
 - c) Kabupaten Lebak.

- 3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: Sempadan pantai, Sempadan sungai Kawasan sekitar danau atau waduk, Kawasan sekitar mata air, Kawasan lindung geologi dan RTH Perkotaan.
- a) Sempadan pantai seluas lebih kurang 3.326,36 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam koma tiga enam) hektar berada di:
- Kabupaten Serang;
 - Kota Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten lebak; dan
 - Kota Cilegon.
- b) Sempadan sungai seluas lebih kurang 27.504,48 (dua puluh tujuh ribu lima ratus empat koma empat delapan) hektar dan kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen meliputi:
- DAS Ciujung;
 - DAS Cidurian;
 - DAS Cilemer;
 - DAS Ciliman;
 - DAS Cibanten;
 - DAS Cidanau;
 - DAS Cimanceuri;
 - DAS Cisadane;
 - DAS Cibiruangeun;
 - DAS Cihara;
 - DAS Cimadur; dan
 - DAS Cibareno.
- c) Kawasan sekitar danau atau waduk seluas lebih kurang 555,59 (lima ratus lima puluh lima koma lima sembilan) hektar berada di:
- Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kota Tangerang;
 - Kota Tangerang Selatan;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak; dan

- Kota Cilegon
- d) Kawasan sekitar mata air yang berada di:
- Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Pandeglang; dan
 - Kabupaten Serang.
- e) Kawasan lindung geologi seluas lebih kurang 1.961,49 (seribu sembilan ratus enam puluh satu koma empat sembilan) hektar di Kabupaten Lebak.
- f) RTH Perkotaan di Provinsi Banten tersebar di kabupaten atau kota
- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi kawasan: Cagar alam, taman nasional, taman hutan raya Banten, taman wisata alam; dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- a) Kawasan cagar alam meliputi :
- Cagar Alam Rawa Danau seluas lebih kurang 3.542,43 (tiga ribu lima ratus empat puluh dua koma empat tiga) hektar yang terdapat di Kabupaten Serang;
 - Cagar Alam Gunung Tukung Gede seluas lebih kurang 1.521,01 (seribu lima ratus dua puluh satu koma nol satu) hektar yang terdapat di Kabupaten Serang; dan
 - Cagar Alam Pulau Dua seluas lebih kurang 34,52 (tiga puluh empat koma lima dua) hektar yang terdapat di Kota Serang.
- b) Kawasan Taman Nasional meliputi:
- Taman Nasional Ujung Kulon seluas lebih kurang 61.363,05 (enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga koma nol lima) hektar yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang; dan
 - Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas lebih kurang 31.978,63 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma enam tiga) hektar yang terdapat di Kabupaten Lebak.
- c) Kawasan Taman Hutan Raya Banten meliputi Gunung Asepun Kabupaten Pandeglang seluas lebih kurang 1.595,90

(seribu lima ratus sembilan puluh lima koma sembilan nol) hektar;

d) Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Pulau Sangiang seluas lebih kurang 558,64 (lima ratus lima puluh delapan koma enam empat) hektar terdapat di Kabupaten Serang;

e) Kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan meliputi:

- Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy seluas lebih kurang 4.564, 12 (empat ribu lima ratus enam puluh empat koma satu dua) hektar yang terdapat di Kabupaten Lebak;
- Pelestarian bangunan gedung dan / atau lingkungan cagar budaya di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
- Kawasan Kasepuhan Cisitu yang terdapat di Kabupaten Lebak;
- Kawasan masyarakat hukum adat kasepuhan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- Kawasan cagar budaya di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.
- Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita seluas 1.505,65 (seribu lima ratus lima koma enam lima) hektar diarahkan pada Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang

5) Kawasan rawan bencana terdiri dari: Rawan banjir;, Rawan tsunami, Rawan gempa bumi, Rawan kebakaran hutan dan lahan, Rawan angin topan dan puting beliung , Rawan tanah longsor, Rawan kekeringan; dan Rawan gagal teknologi

a) Kawasan rawan banjir meliputi:

- Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang;
- Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang;
- Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang;

- Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibuangeun di Kabupaten Lebak; dan
 - Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang.
- b) Kawasan rawan tsunami, terdapat di pesisir pantai, yang meliputi:
- Pantai Utara, terletak di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang;
 - Pantai Selatan, terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; dan
 - Pantai Barat, terletak Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.
- c) Kawasan rawan gempa bumi meliputi :
- Kabupaten Pandeglang
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang; dan
 - Kota Serang.
- d) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:
- Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kota Serang; dan
 - Kota Cilegon.
- e) Kawasan rawan angin topan dan puting beliung meliputi:
- Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kota Serang;
 - Kota Cilegon;
 - Kota Tangerang; dan
 - Kota Tangerang Selatan.
- f) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi:
- Kabupaten Pandeglang
 - Kabupaten Lebak; dan

- Kabupaten Serang
 - g) Kawasan rawan bencana diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
 - h) Kawasan rawan bencana gagal teknologi meliputi;
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kota Serang;
 - Kota Cilegon;
 - Kota Tangerang; dan
 - Kota Tangerang Selatan
 - i) Rehabilitasi Buffer Zone rawan bencana melalui RTH sebesar 30%; dan
 - j) Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi diarahkan tersebar di wilayah rawan bencana di Provinsi Banten.
- b. Pola ruang kawasan budidaya
- Pola ruang kawasan budidaya di Provinsi Banten dengan luas lebih kurang 779.800,93 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus koma sembilan tiga) hektar, meliputi Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan peruntukan perkebunan, Kawasan peruntukan pertambangan, Kawasan peruntukan industry, Kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan lainnya.
- 1) Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi
- a) Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi seluas lebih kurang 84.217,45 (delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas empat koma empat lima) hektar
 - b) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
 - Hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 39.008,40 (tiga puluh sembilan ribu delapan koma empat nol) hektar; dan
 - Hutan produksi tetap seluas lebih kurang 45.209,04 (empat puluh lima ribu dua ratus sembilan koma nol empat) hektar .

- c) Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan di wilayah:
- Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak; dan
 - Kota Cilegon.

2) Kawasan budidaya pertanian

- a) Kawasan budidaya pertanian lebih kurang 196.000,10 (seratus sembilan puluh enam ribu koma satu nol) hektar, meliputi :

- Kawasan budidaya pertanian lahan basah seluas lebih kurang 124.263,54 (seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima empat) hektar
- Kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas lebih kurang 71.736,56 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma lima enam) hektar
- Kawasan budidaya pertanian diarahkan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

- b) Kawasan budidaya hortikultura diarahkan di wilayah:

- Kabupaten Serang;
- Kabupaten Tangerang;
- Kabupaten Pandeglang;
- Kabupaten Lebak; dan
- Kota Tangerang Selatan.

- c) Kawasan budidaya peternakan diarahkan di wilayah:

- Kabupaten Serang;
- Kabupaten Tangerang;
- Kabupaten Pandeglang;
- Kabupaten Lebak; dan
- Kota Serang;

- d) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas lebih kurang 196.012,28 (seratus sembilan puluh enam ribu dua belas koma dua delapan) hektar terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan cadangan di daerah yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan;

- e) Ketentuan lebih rinci mengenai Kawasan Lahan Pertanian Pagan Berkelanjutan (KP2B) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - f) kawasan agropolitan diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Tangerang.
 - g) Kawasan Sistem Pertanian Terpadu diarahkan di wilayah Kota Serang
- 3) Kawasan peruntukan perkebunan
- Kawasan peruntukan perkebunan seluas lebih kurang 191.065,09 (seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh lima koma nol sembilan) hektar yang diarahkan di wilayah:
- Kabupaten Serang;
 - Kota Serang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak
- 4) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan
- a) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan seluas lebih kurang 1.620,02 (seribu enam ratus dua puluh koma nol dua) hektar seluruh wilayah Provinsi Banten.
 - b) Mengembangkan kawasan minapolitan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Pandeglang; dan
 - Kota Serang.
 - c) Prasarana Pelabuhan Perikanan meliputi:
 - Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sebagai Pelabuhan Nusantara di Kota Serang.
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Cilegon di Kota Cilegon;

- Pangkalan Pendaratan Ikan Banyuasih, Carita, Cikeusik, Citerep, Panimbang, Sidamukti, Sukanegara, Sumur, Tamanjaya di Kabupaten Pandeglang;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Anyer, Domas, Kepuh, Lontar, Pasauran, Pulau Panjang, Pulokali, Tengkurak, Terate, Wadas di Kabupaten Serang;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Bayah, Binuangeun, Cibareno, Panyaungan, Pulomanuk, Sawarna, Situregen, Sukahujan, Tanjungpanto di Kabupaten Lebak;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis, Dadap, Ketapang, Kronjo, Mauk Barat, Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang;
- Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan di Kabupaten Pandeglang;
- Pelabuhan Perikanan Pantai Binuangeun di Kabupaten Lebak; dan
- Rencana Pembangunan pelabuhan perikanan Citarate Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak

5) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan meliputi: Kawasan peruntukan pertambangan mineral, Kawasan peruntukan pertambangan batubara, Kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi

a) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan mineral

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

- Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- b) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan batu bara diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - c) Pola ruang kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - d) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 6) Pola ruang kawasan peruntukan industri
- a) Pola ruang kawasan peruntukan industri seluas lebih kurang 54.459,93 (lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar meliputi:
 - Industri besar, diarahkan di wilayah: Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang; dan Kabupaten Lebak.
 - Industri menengah, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten
 - Industri kecil, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten
 - b) Rencana Pembangunan Kawasan Industri Prioritas di Kawasan Industri Wilmar Serang Kabupaten Serang.
- 7) Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata
- Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 2.598,05 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma nol lima) hektar diarahkan di wilayah:
- a) Kawasan pariwisata Pantai Barat dan KEK Tanjung Lesung;
 - b) Kawasan pariwisata Pantai Utara ;
 - c) Kawasan pariwisata Budaya Banten Lama;
 - d) Kawasan pariwisata Pantai Selatan;
 - e) Kawasan pariwisata Budaya Permukiman Baduy;
 - f) Kawasan pariwisata Alam Taman Nasional Ujung Kulon;

- g) Kawasan pariwisata Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun – Gunung Salak;
 - h) Kawasan pariwisata Geopark, dan
 - i) Kawasan pariwisata Agro
- 8) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman
- a) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman di Daerah seluas lebih kurang 249.840,27 (dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh koma dua tujuh) hektar;
 - b) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten,
 - c) Rencana pengembangan Kota Baru Publik Maja; dan
 - d) Rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh di Provinsi Banten
- 9) Kawasan peruntukan lainnya
- Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan andalan nasional, Pertahanan keamanan, kawasan untuk pelayanan umum dan kawasan lainnya;
- a) kawasan andalan nasional di Provinsi Banten meliputi :
 - kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan pertambangan dan panas bumi;
 - kawasan andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
 - b) Kawasan Pertahanan Keamanan di wilayah Provinsi Banten dengan memperhatikan fungsi kawasan meliputi :
 - Daerah Latihan Pertahanan Pantai
 - Daerah Pertempuran
 - Daerah Latihan Hambat
 - Daerah Komunikasi
 - Daerah Belakang
 - Daerah Pangkal Perlawanan
 - c) Kawasan untuk pelayanan umum meliputi:

- Pelayanan kesehatan, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten; dan
 - Pelayanan pendidikan, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- d) Rencana Pengembangan Kawasan pada sepanjang jalan tol dan interchange jalan tol;
- e) Rencana pembangunan dan pengembangan budidaya peternakan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- f) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang kawasan dengan potensi pertanian dan perkebunan; dan
- g) Rencana pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Banten.

Tabel 6.5
Hasil Telaahan Pola Ruang Provinsi Banten

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/ INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan Lindung	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
II	Pengendalian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya							
II.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan resapan air	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
III	Pengendalian Kawasan Perlindungan Setempat							
III.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Sempadan pantai	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
III.2	Rehabilitasi dan Perlindungan Sempadan sungai	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	DAS Ciujung, DAS Cidurian, DAS Cilemer, DAS Ciliman, DAS Cibanten, DAS Cidanau, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Cibuangeun, DAS Cihara, DAS Cimadur, DAS Cibareno, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak KotaCilegon	*	*	*	*	*
III.3	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan sekitar mata air		Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
III.4	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Lindung Geologi Bentang Alam Karst		Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
IV	Pengendalian Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya							
IV.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Cagar Alam	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	a. Cagar Alam Rawa Danau b. Cagar Alam Gunung Tukung Gede c. Cagar Alam Pulau Dua	*	*	*	*	*
IV.2	Rehabilitasi dan Perlindungan Taman Nasional		a. Taman Nasional Ujung Kulon b. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	*	*	*	*	*
IV.3	Rehabilitasi dan Perlindungan Taman Hutan Raya		Gunung Asepun Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/ INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.4	Rehabilitasi dan Perlindungan Taman Wisata Alam		Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kab. Serang	*	*	*	*	*
IV.5	Rehabilitasi Perlindungan Kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan b. Program Pelestarian Kebudayaan	a. Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy b. Pelestarian bangunan gedung dan / atau lingkungan cagar budaya c. Kawasan Kasepuhan Cisititu d. Kawasan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan e. Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	*	*	*	*	*
V	Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Alam							
V.1	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Banjir	a. Program Penanggulangan Bencana b. Program Penataan Ruang	Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang, Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang, Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang, Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibuungeun di Kabupaten Lebak, Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
V.2	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Tsunami		Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang,, Kabupaten Pandeglang , Kabupaten Lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
V.3	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.4	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Program Penanggulangan Bencana b. Program Penataan Ruang	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.5	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	c. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Kabupaten Pandeglang , Kabupaten Lebak , Kabupaten Serang , Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
V.6	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem, Angin Topan dan Puting Beliung	Program Penanggulangan Bencana	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.7	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor		Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/ INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.8	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kekeringan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.9	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Gagal Teknologi		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	*	*	*	*	*
V.10	Rehabilitasi Buffer Zone rawan bencana melalui RTH sebesar 30%		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.11	Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VI	Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi							
VI.1	Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
VII	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Peruntukan Pertanian							
VII.1	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan	Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
VII.2	Pengembangan Kawasan Budidaya Hortikultura		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan	*	*	*	*	*
VII.3	Pengembangan Kawasan Budidaya Peternakan		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang	*	*	*	*	*
VII.4	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B)		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.5	Pengembangan Kawasan Agropolitan		Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*
VII.6	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Terpadu		Kota Serang	*	*	*	*	*
VIII	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
IX	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan							

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/ INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX.1	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Budidaya Perikanan, dan Kawasan Pengolahan Ikan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IX.2	Pengembangan Kawasan Minapolitan		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang	*	*	*	*	*
IX.3	Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IX.4	Pelabuhan Perikanan Pantai		Labuan di Kabupaten Pandeglang, Binuangeun di Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
IX.5	Rencana Pembangunan pelabuhan perikanan Pantai		Citarate di Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
X	Pengendalian Kawasan Peruntukan Pertambangan							
X.1	Pengendalian Pertambangan Mineral	Program Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan geologi, air tanah, mineral dan batubara	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.2	Pengendalian Pertambangan Batubara		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.3	Pengendalian Peruntukan Pemanfaatan Pertambangan Panas Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.4	Pengendalian Peruntukan Pemanfaatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Industri							
XI.1	Pengembangan dan Pengendalian Industri	Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI.2	Rencana Pembangunan Kawasan Industri Prioritas di Kawasan Industri Wilmar Serang		Kab. Serang	*	*	*	*	*
XII	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata							
XII.1	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIII	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Permukiman							
XIII.1	Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIII.2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/ INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIII.3	Rencana pengembangan Kota Baru Publik Maja		Kab. Lebak dan Kab. Tangerang	*	*	*	*	*
XIII.4	Rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Lainnya							
XIV.1	Kawasan Andalan Nasional	a. Program Penataan Ruang b. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif d. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan e. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut f. Program Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan geologi, air tanah, mineral dan batubara	kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya	*	*	*	*	*
XIV.2	Kawasan Pertahanan keamanan	a. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV.3	Kawasan untuk pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV.4	Rencana pengembangan kawasan pada sepanjang ruas tol dan interchange Tol	Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV.5	Rencana pembangunan dan pengembangan budidaya peternakan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV.6	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Cibaliung dengan potensi pertanian dan perkebunan		Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
XIV.7	Rencana pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Provinsi Banten	*	*	*	*	*

6.2.1.3. Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

1. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten meliputi:

- a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah;
- b. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar;
- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
- d. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
- e. Pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

3. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten meliputi :

- a. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan *pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah*, meliputi :
 - 1) Menetapkan kawasan strategis Provinsi Banten yang berfungsi lindung;

- 2) Mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan strategis Provinsi Banten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
 - 3) Mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
 - 4) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - 5) Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - 6) Mewujudkan rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten;
 - 7) Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.
- b. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan *pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar*, meliputi:
- 1) Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - 2) Meningkatkan kepariwisataan;
 - 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 4) Melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.
- c. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan *pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional*, meliputi:

- 1) Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam, kegiatan budidaya unggulan, dan posisi atau letak strategisnya sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - 3) Mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - 4) Memanfaatkan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - 5) Mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan dan efisiensi pemanfaatan kawasan;
 - 6) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - 7) Mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif;
 - 8) Mewujudkan terbentuknya sinergisitas interaksi ekonomi wilayah hulu dan hilir pada pusat-pusat pertumbuhan dengan pemasaran regional dan nasional melalui sistem jaringan transportasi wilayah dan nasional.
- d. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan*, meliputi:
- 1) Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - 2) Meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - 3) Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - 4) Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
 - 5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
 - 6) Mewujudkan terselenggaranya interaksi kawasan-kawasan strategis nasional di Provinsi Banten dengan penataan struktur ruang dan pola ruang di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota

- e. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa*, meliputi:
- 1) Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya bangsa yang mencerminkan jati diri yang berbudi luhur;
 - 2) Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat;
 - 3) Melestarikan situs warisan budaya bangsa.
- f. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*, meliputi:
- 1) Mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - 2) Meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
 - 3) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
- g. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara*, meliputi:
- 1) Mendelineasikan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara yang terletak di wilayah Provinsi Banten;
 - 2) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 3) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun; dan turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

3. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten

Kawasan strategis di wilayah provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan: pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selain penetapan kawasan strategis Pemerintah Daerah juga melakukan pengembangan kawasan strategis di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengaturan ruang kawasan strategis provinsi diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

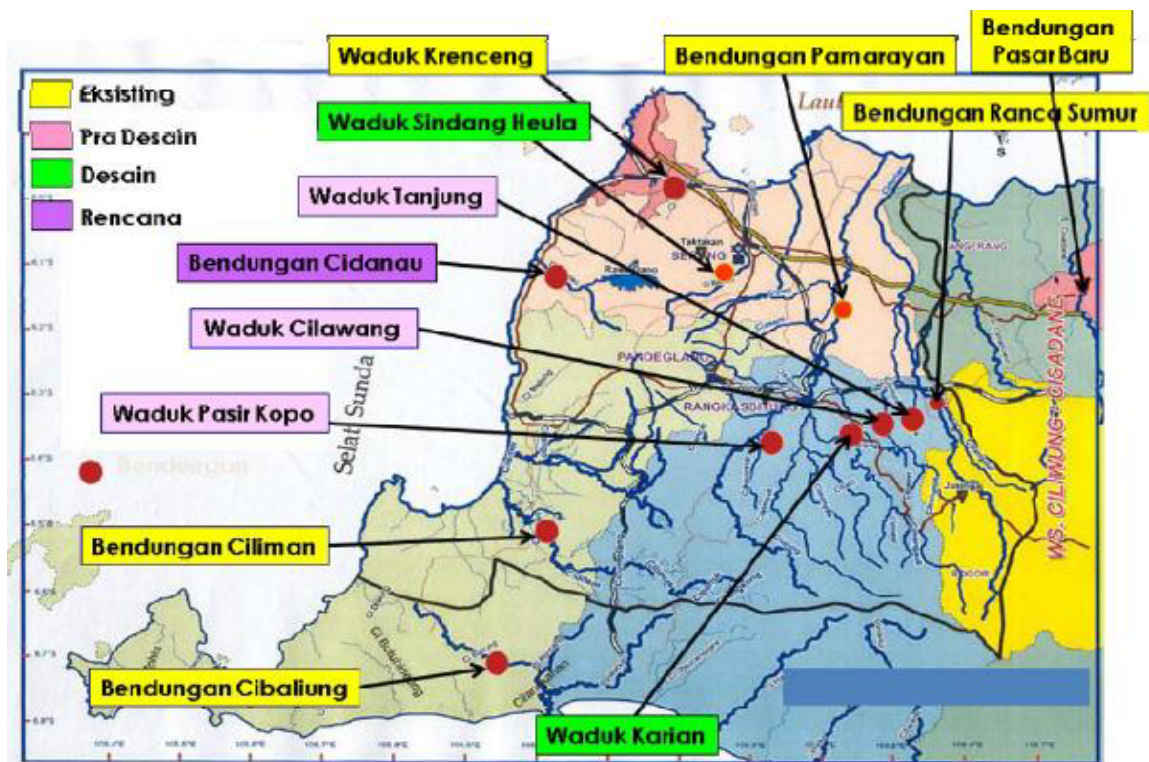
- a. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan perbatasan Negara di laut lepas .
- b. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan di wilayah:
 - 1) kawasan strategis nasional meliputi:
 - Kawasan Selat Sunda;
 - Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.
 - 2) Kawasan Strategis Provinsi meliputi:
 - Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
 - Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
 - Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
 - Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Ciligrang, Kecamatan

- Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;
- Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah
- c. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang
- d. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada: Bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
- e. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di wilayah:
- 1) Kawasan Strategis Nasional yaitu sekitar Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
 - 2) Kawasan Strategis Provinsi yaitu kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Tabel 6.6
Hasil Telaahan Kawasan Strategis Provinsi Banten

NO	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi							
I.1	Pengembangan dan Pengendalian KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten)	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur c. Program Penataan Ruang	Kota Serang (Kecamatan Curug, Cipocokjaya dan Kecamatan Serang)	*	*	*	*	*
I.2	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon)	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur termasuk Sport Centre c. Program Penataan Ruang d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
I.3	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Serang Utara Terpadu	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur c. Program Penataan Ruang	Kabupaten Serang (Kecamatan Bojonegara, Kramatwatu, Pontang, Tirtayasa, Tanara), Kota Serang (Kecamatan Kasemen)	*	*	*	*	*
I.4	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Pantai Selatan Terpadu	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur c. Program Penataan Ruang d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cikeusik), Kabupaten Lebak (Kecamatan Wanasalam, Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah, Ciligrang, Cibeber)	*	*	*	*	*
I.5	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur c. Program Penataan Ruang d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*

NO	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Sosial dan Budaya							
II.1	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Situs Banten Lama	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur c. Program Penataan Ruang d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif f. Program Pelestarian Kebudayaan	Kota Serang Kabupaten Serang	*	*	*		
III	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi							
III.1	Pembangunan Bendungan Karian	Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Lebak	*	*	*		
IV	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup							
IV.1	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Strategis Provinsi	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur c. Program Penataan Ruang d. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup e. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*



Gambar 6.1 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air



Gambar 6.2 Wilayah Kerja Pembangunan

6.2.3 ARAH KEBIJAKAN HOLISTIK TEMATIK INTEGRATIF SPASIAL PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN

HOLISTIK – TEMATIK

Pengertian holistik adalah cara pandang yang menyatakan keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting dari pada bagian-bagiannya. Kata holistik berasal dari bahasa Inggris Holistic yang artinya menekankan pentingnya keseluruhan dan saling terkait dari bagian-bagiannya.

Pengertian tematik dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung pengertian segala sesuatu berhubungan dengan tema (menjadi pokok permasalahan). Dalam pendekatan tematik di artikan sebagai sebuah pola yang menyatukan unsur yang dikaitkan/terpusat pada suatu tema/pokok permasalahan sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain.

Pendekatan tematik – holistik adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat keterkaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi pendekatan ini mengutamakan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, prioritas pembangunan di Provinsi dengan indikasi kegiatan sampai koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta antar perangkat daerah bertujuan mencapai sasaran prioritas nasional dan prioritas tingkat provinsi yang didukung oleh kementerian dan lembaga, perangkat daerah pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten /kota.

PENDEKATAN INTEGRATIF

Pengertian integratif sebagai penyatuan berbagai aspek kedalam satu keutuhan yang padu yang dapat diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek kedalam satu proses. Jika dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, pendekatan integratif melakukan proses mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan yang terdapat pada perangkat daerah agar dapat saling terintegrasi dengan kegiatan pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung keberhasilan kebijakan prioritas.

PENDEKATAN SPASIAL

Pengertian spasial dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan ruang dan tempat.

Pendekatan spasial lebih sering digunakan dalam bidang geografi (keuangan) yang merupakan pendekatan yang khas, karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya. Dalam pembangunan daerah pendekatan spasial instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, pembahasan spasial digunakan saat pembahasan menyepakati fokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa acuan perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya diselaraskan dengan usulan kabupaten/kota.

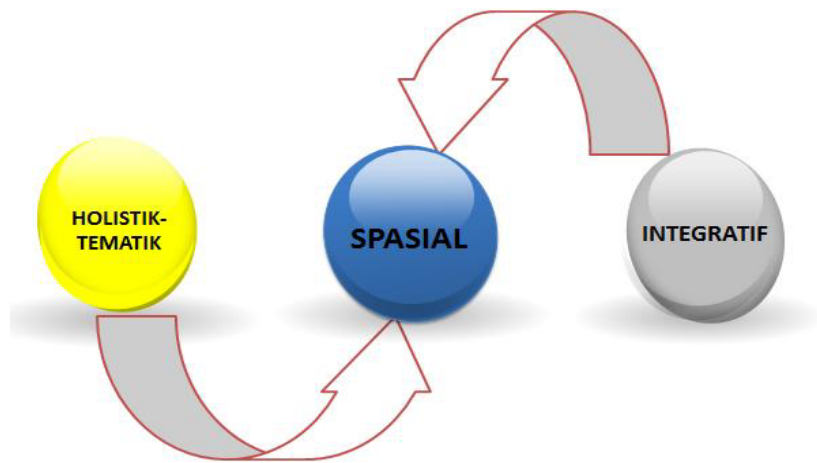
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 melakukan pendekatan holistik – tematik, integratif spasial pada 6 tema pembangunan dengan mempertimbangkan:

1. Tematik tersebut merupakan agenda pembangunan nasional yang selaras dengan solusi yang ingin di selesaikan terhadap persoalan yang ada di Provinsi Banten;
2. Tematik tersebut merupakan isu strategis pembangunan daerah yang selaras dengan solusi yang ingin diselesaikan terhadap persoalan yang ada di Provinsi Banten;
3. Tematik tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan solusi yang ingin di selesaikan terhadap persoalan yang ada di Provinsi Banten;
4. Tematik tersebut merupakan pilihan tema pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ingin dikembangkan diprovnsi Banten.

Arah kebijakan tematik tersebut yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran;
2. Ketahanan Pangan;
3. Pariwisata;
4. Kota Metropolitan Serang;
5. Daya saing daerah;

6. Daya saing perekonomian daerah.



Gambar 6.3 Tematik-Holistik Integratif Spasial

Penataan dari masing masing tematik- holistik integrasi spasial sebagai berikut :

6.2.6.1 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

LEVEL 1 : Meningkatkan taraf hidup penduduk ekonomi desa miskin dan peluang bekerja



LEVEL 2 : 1. Perencanaan, pengendalian pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan dan inflasi rendah



LEVEL 2 : 2. Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya



LEVEL 2 : 3. Perkuatan infrastruktur desa miskin



LEVEL 2 : 4 . Pembangunan kewirausahaan KUKM dan ekonomi kreatif



LEVEL 2 : 5 . Pengurangan beban penduduk miskin



MATRIK TEMATIK PENANGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	(Meningkatkan taraf hidup penduduk ekonomi desa miskin dan peluang bekerja	1	Angka kemiskinan
		2	Tingkat pengangguran terbuka

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Perencanaan, pengendalian pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan dan inflasi rendah	Bappeda	1	Penyusunan program dan kegiatan kemiskinan dan pengangguran terealisasi baik
			2	Kaji terap penelitian intervensi kemiskinan dan pengangguran
		BPS banten	3	Arahan kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran versi BPS
		Bank Indonesia	4	Arahan kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran versi BI
		Biro ekonomi	5	Kebijakan ekonomi dalam intervensi kegiatan kemiskinan dan pengangguran
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	6	kaji terap strategi naker dalam intervensi pengangguran
2	Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Kegiatan padat karya pembangunan jalan jembatan dalam intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	Kegiatan padat karya pembangunan praswil dalam intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	target penanaman modal dalam solusi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Pariwisata	4	Kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran pada pariwisata
		Dinas Pertanian	5	Kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran pada pertanian
		TNI	6	Kegiatan manunggal pada opd terkait dalam intervensi kemiskinan dan pengangguran

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	7	Kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran pada kelautan dan perikanan
		Dinas Ketahanan Pangan	8	Target pertumbuhan pangan intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	9	Kegiatan bersama mitra strategi naker intervensi kemiskinan dan pengangguran
3	Perkuatan infrastruktur desa miskin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Kegiatan perbaikan lingkungan pemukiman desa miskin
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Kegiatan perbaikan infrastruktur desa miskin
		Dinas Perhubungan	3	Kegiatan perbaikan akses transportasi desa miskin
		Dinas Pertanian	4	Kegiatan perbaikan infrastruktur pertanian desa miskin
4	Pembangunan kewirausahaan KUKM dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Pengadaan sarpras pembangunan umkm bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	Pengadaan sarpras pembangunan indag bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Pariwisata	3	Pengadaan sarpras pembangunan pariwisata bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Sisinfokemiskinan dan ketenagakerjaan
		Dinas Pertanian	5	Pengadaan sarpras pembangunan pertanian bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6	Pengadaan sarpras pembangunan bidang pora bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Kelautan dan Perikanan	7	Pengadaan sarpras pembangunan bidan kelautan dan perikanan bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8	Pengadaan sarpras pembangunan bidan energi sdm bagi miskin dan pengangguran
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	9	Pengadaan sarpras pembangunan bidan nakertrans bagi miskin dan pengangguran

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
5	Pengurangan beban penduduk miskin	Dinas Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan bagi masyarkat miskin
		Dinas Sosial	2	Penangan masyarakat miskin
		BPJS	3	Subsidi masyarakat miskin
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Bea siswa masyarkat miskin
		Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Penanganan masyarkat miskin pesisir
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	6	Kegiatan dengan mitra strategis nakertransdalam penanggulangan kemiskinan
		Dinas Pertanian	7	Kegiatan dengan mitra strategis pertanian dalam penanggulangan kemiskinan
		Biro KESRA	8	Kebijakan dalam intervensi beban kemiskinan dan pengangguran

6.2.6.2 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN

LEVEL 1 : Pembangunan ketahanan pangan



LEVEL 2 : 1. Pembangunan ketahanan pangan



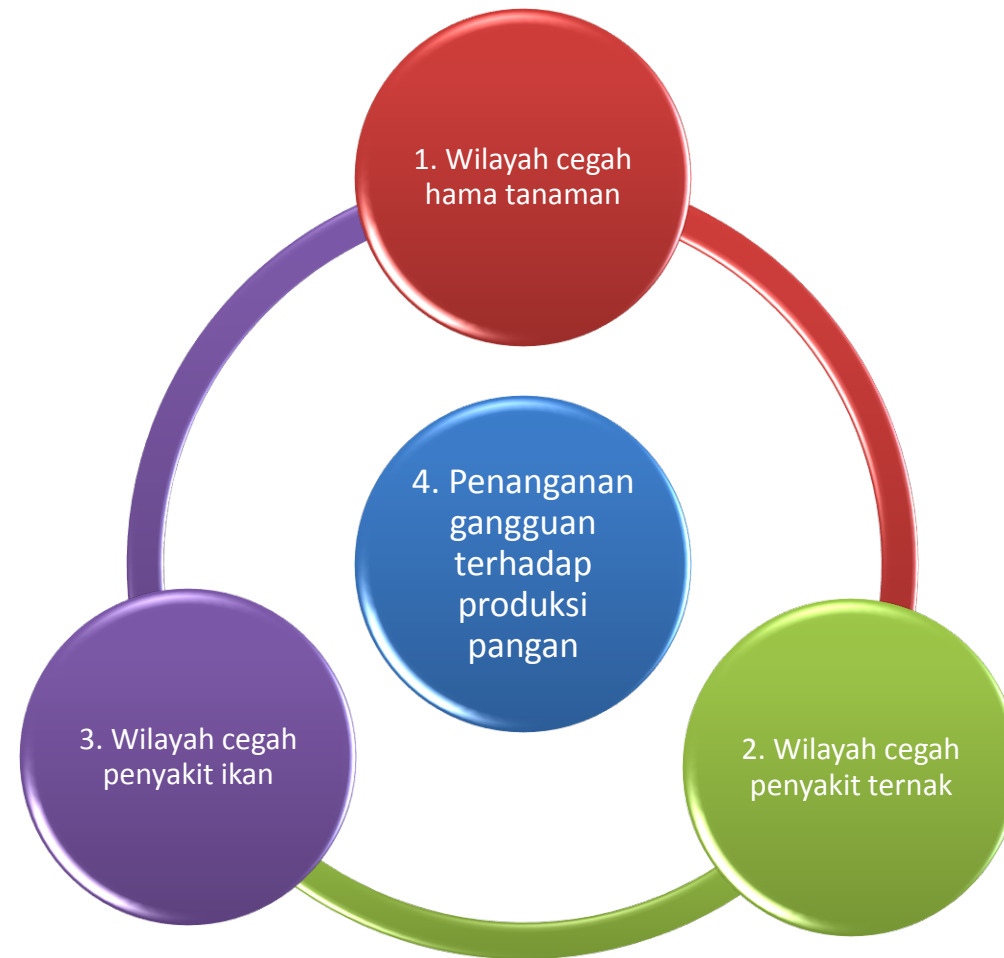
LEVEL 2 : 2. Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat



LEVEL 2 : 3. Peningkatan mutu kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat



LEVEL 2 : 4. Penanganan gangguan terhadap produksi pangan



LEVEL 2 : 5. Penguatan kelembagaan petani



LEVEL 2 : 6. Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah produk pangan



Matrik Tematik Ketahanan Pangan

	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	
	Pembangunan ketahanan pangan dalam meningkatkan indeks ketahanan pangan daerah	1	Indeks Ketahanan Pangan

	Integrasi Tema Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Indikasi Kegiatan	
1	Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	1	Sistem pengendalian ketahanan pangan
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Penataan kawasan produktifitas
		Dinas Pertanian	3	Peningkatan produksi padi
		Dinas Kelautan dan Perikanan	4	Peningkatan produksi perikanan
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5	Luasan lahan hijau produktif
2	Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Jumlah titik distribusi startegis
		Dinas Perhubungan	2	Dukungan atribusi distribusi
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Jumlah ruas jalan dukungan titik distribusi
		Dinas Pertanian	4	Pengaturan siklus kawasan produksi
		Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Pengaturan siklus produksi perikanan
3	Peningkatan mutu kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Ketersediaan pangan lokal
		Dinas Kesehatan	2	Tingkat kesehatan Produk Makanan
		BPOM	3	Tingkat kesehatan pangan dan halal
		Dinas Pertanian	4	Ketersediaan pangan lokal
		Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Gerakan makan produk ikan
4	Penanganan gangguan terhadap produksi pangan	Dinas Pertanian	1	Wilayah cegah hama tanaman
		Dinas Pertanian	2	Wilayah cegah penyakit ternak
		Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Wilayah cegah penyakit ikan

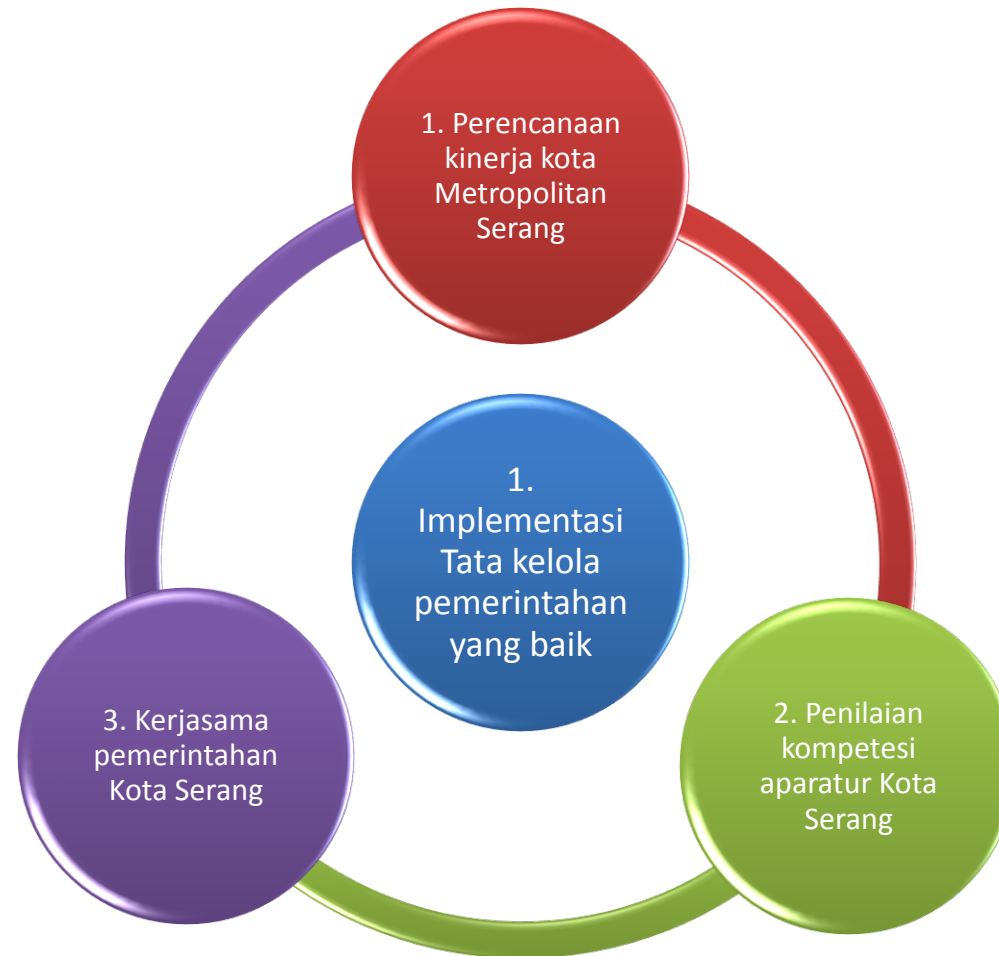
	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
5	Penguatan kelembagaan petani	Dinas Pertanian	1	Kelompok petani katagori baik
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Kelompok koperasi katagori baik
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	Kelompok UMKM katagori baik
		Dinas Kelautan dan Perikanan	4	Kelompok nelayan katagori baik
6	Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah produk pangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Tersedia teknologi pengolahan ikan
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Tersedia teknologi dan menjamin UMKM berkelanjutan
		Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Tersedia teknologi alat deteksi ikan
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Sismonev pengembangan umkm
		Dinas Ketahanan Pangan	5	Sisdaketpa (sistem pengendalian ketahanan pangan Banten)
		Biro Bina Perekonomian	6	Kebijakan peningkatan ekonomi Banten
		Biro Infrastruktur & SDA	7	Kebijakan infrastruktur ekonomi Banten

6.2.6.3 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK METROPOLITAN SERANG

LEVEL 1 : Pembangunan tematik metropolitan serang



LEVEL 2 : 1. Implementasi Tata kelola pemerintahan yang baik



LEVEL 2 : 2. Implementasi Tata kelola pemerintahan yang baik



LEVEL 2 : 3. Infrastruktur Keterkaitan Antar Kota metropolitann serang Dalam Sistem Perkotaan



LEVEL 2 : 4. Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP)



LEVEL 2 : 5. Mengembangkan kota cerdas, dan hijau secara berkelanjutan



LEVEL 2 : 6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota



MATRIK TEMATIK KOTA METROPOLITAN SERANG

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Meningkatnya aktifitas penataan wilayah serang yang mengukur kinerja pencapaian menuju kota Metropolitan Serang	1	Prosentase kinerja pengembangan kota Metropolitan Serang

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Implementasi Tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda	1	Perencanaan Pembangunan Metropolitan Serang
		Badan Kepegawaian Daerah	2	Penilaian kompetensi aparatur Kota Serang
		Bidang pemerintahan	3	Kerjasama pemerintahan Kota Serang
2	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Standar pelayanan pendidikan Kota Serang
		Dinas kesehatan	2	Standar pelayanan kesehatan Kota Serang
3	Infrastruktur Keterkaitan Antar Kota metropolitann serang Dalam Sistem Perkotaan	Kementrian PUPR, Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota serang	1	Konektifitas dengan Pusat Kawasan Nasional
		Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang	2	Pengembangan kawasan perkotaan Metropolitan Serang
		Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang	3	Konektifitas dengan pusat kawasan wilayah
		Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang, dinas terkait	4	Konektifitas dengan pusat kawasan strategis kota (Pariwisata, perdagangan, pendidikan, industri, iptek)
		Dinas PUPR ,dishub Banten dan PUPR, dishub Kota serang,	5	konektiftas moda transportasi antar kawasan
4	Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP)	Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang	1	Ketersediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan
		Dinas pendidikan Banten dan Dinas pendidikan Kota Serang	2	Ketersediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya yang berkualitas
		Dinas PRKP Banten dan Dinas PRKP Kota Serang	3	Ketersediaan sarana permukiman
		Dinas Perhubungan Banten dan Dinas Perhubungan Kota Serang	4	Ketersediaan sistem transportasi publik

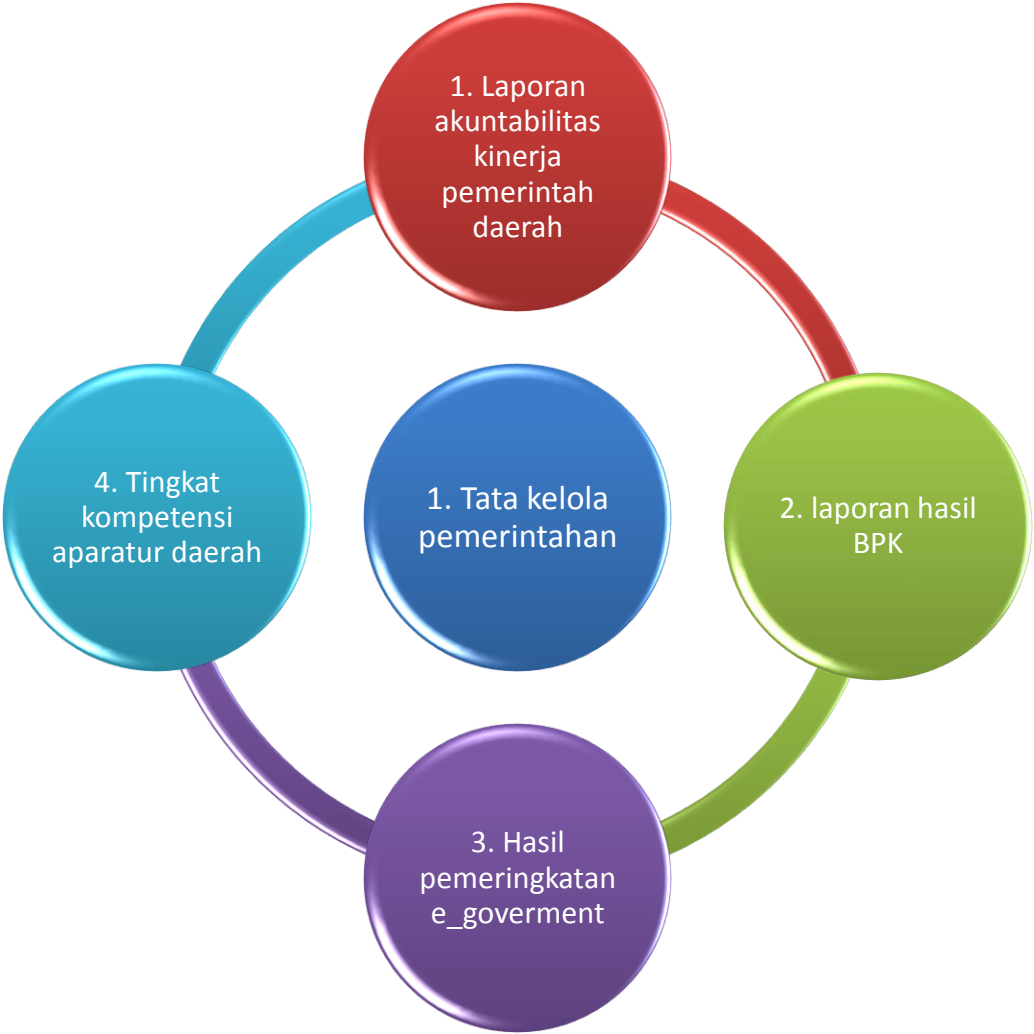
INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas sosial Banten dan Dinas sosial Kota Serang	5	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan serang
5	Mengembangkan kota cerdas, dan hijau secara berkelanjutan	Dinas PUPR Banten dan Dinas PUPR kota serang	1	Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan
		Dinas Kominfo Banten dan Dinas kominfo Kota Serang	2	ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengelolan kota metropolitan serang
		Dinas Kominfo,Indag,Kop ukm Banten dan Kominfo,Indag,Kop UMKM Kota Serang	3	Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif
		Dinas Kominfo,Dis LH hutan, Banten dan kominfo, Dis LH hutan Kota Serang	4	ketersediaan Sistem informasi kualitas lingkungan perkotaan
		Dinas Kominfo, Dis LH hutan,Dishub Banten dan Dinas kominfo, Dis LH hutan, Dishub Kota Serang	5	Ketersediaan Transportasi cerdas dan ramah lingkungan
		Dinas Kominfo,Dinas pariwisata Banten dan Dinas Dinas kominfo,Dinas pariwisata Kota Serang	6	Ketersediaan city brandig destinasi wisata kota metropolitan serang
6	Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota	Bapeda, Biro hukum , setwan, Banten dan Dinas Dinas Bapeda, Biro hukum , setwan Kota Serang	1	ketersedian perencanaan, peraturan ,prosedur Kota metropolitaan serang Berkelanjutan
		Bapeda, Biro pemerintahan Banten dan Bapeda, Biro pemerintahan Kota Serang	2	ketersediaan kelembagaan Badan Koordinasi dan kerjasama Pembangunan Kawasan antar Perkotaan metropolitan
		Bapeda, Diskominfo, Banten dan Bapeda, Diskominfo Kota Serang	3	ketersediaan Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu kota metropolitan serang

6.2.6.4 TEMATIK DAYA SAING DAERAH

LEVEL 1 Pembangunan pariwisata Banten



LEVEL 2 : 1. Tata kelola pemerintahan



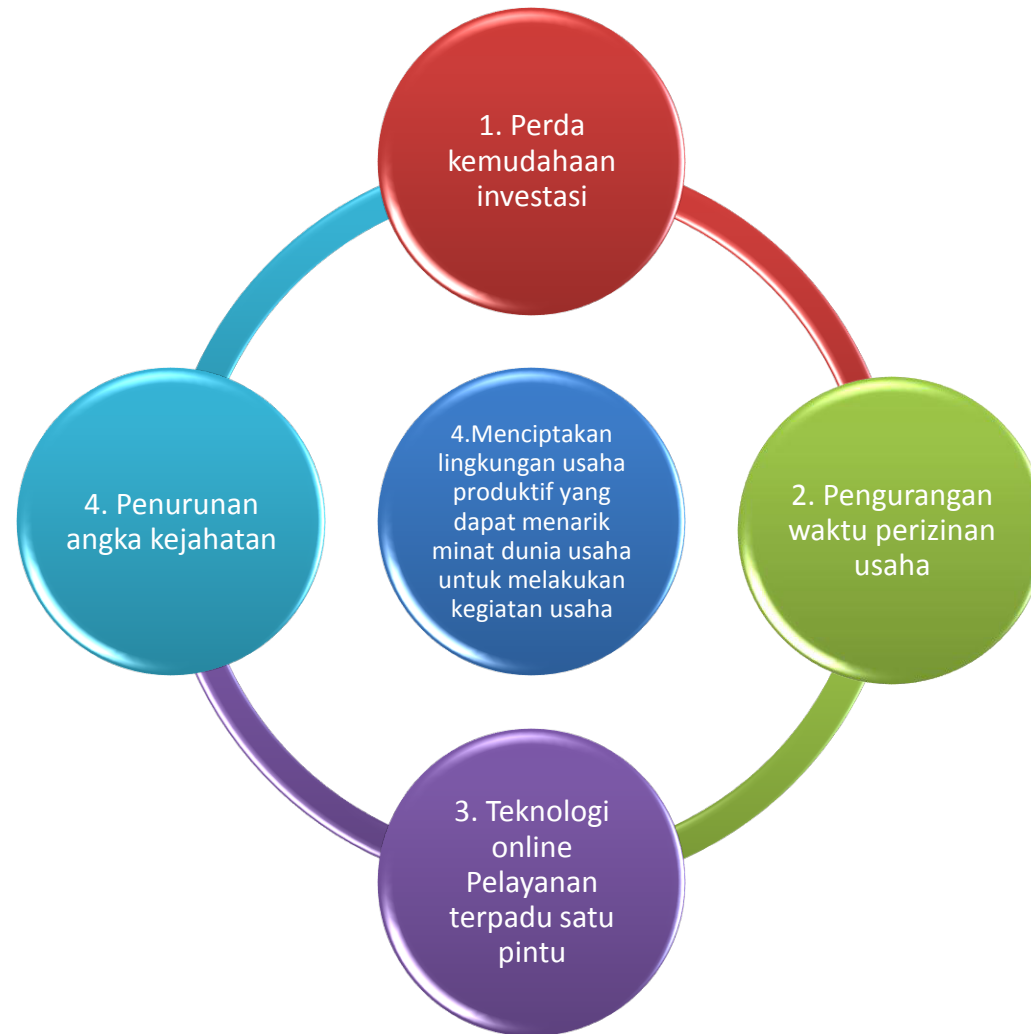
LEVEL 2 : 2. Mendorong aktivitas perekonomian daerah



LEVEL 2 : 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan



LEVEL 2 : 4. Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha



LEVEL 2 : 5. Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya



LEVEL 2 : 6. Meningkatkan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan



MATRIK TEMATIK DAYA SAING DAERAH

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Pembangunan daya saing daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan bekerja	1	Meningkatkan PDRB HK terhadap angkat kerja
		2	Meningkatkan PDRB ADHB Terhadap jumlah penduduk
		3	Tingkat kesempatan kerja

	INTERGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Tata kelola pemerintahan	Biro Organisasi	1	Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Inspektorat	2	laporan hasil BPK
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Hasil pemeringkatan e_government
		Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	4	Tingkat kompetensi aparatur daerah
2	Mendorong aktivitas perekonomian daerah	Badan Pendapatan Daerah	1	Jumlah PAD
		Badan Pendapatan Daerah	2	Jumlah APBD
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	Jumlah investasi daerah
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	Jumlah guru S1 yang berkompentensi baik
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	Persentase penduduk lulus S1.S2.S3
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Perencanaan ketenagakerjaan
		Dinas Kesehatan	5	Angka Harapan Hidup
		Dinas Kesehatan	6	Angka Kematian Bayi dan balita,
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	Tingkat kesempatan kerja
4	Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha	Biro Bina Perekonomian	1	Perda kemudahan investasi
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	Pengurangan waktu perizinan usaha
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Teknologi online Pelayanan terpadu satu pintu
		Satuan Polisi Pamong Praja	4	Penegakan Peraturan Daerah

	INTERGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
5	Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Panjang jalan pada akses distribusi dalam kondisi baik
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Jumlah jembatan pada akses distribusi dalam kondisi baik
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	Jumlah ketersediaan listrik untuk usaha/industri
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Jumlah akses ketersediaan jaringan komunikasi
6	Meningkatkan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan	Biro Bina Perekonomian	1	Ketersediaan jumlah kantor cabang bank untuk melayani masyarakat
		Biro Bina Perekonomian	2	Ketersediaan jumlah lembaga keuangan untuk melayani masyarakat
		Biro Bina Perekonomian	3	Ketersediaan produk perbankan untuk melayani masyarakat
		Biro Bina Perekonomian	4	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perbankan
		Biro Bina Perekonomian	5	Jumlah UKM yang memanfaatkan perbankan

6.2.6.5 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK PARIWISATA

LEVEL 1 Pembangunan pariwisata Banten



LEVEL 2 : 1 Promosi Wisata Banten



LEVEL 2 : 2. Pengembangan destinasi wisata



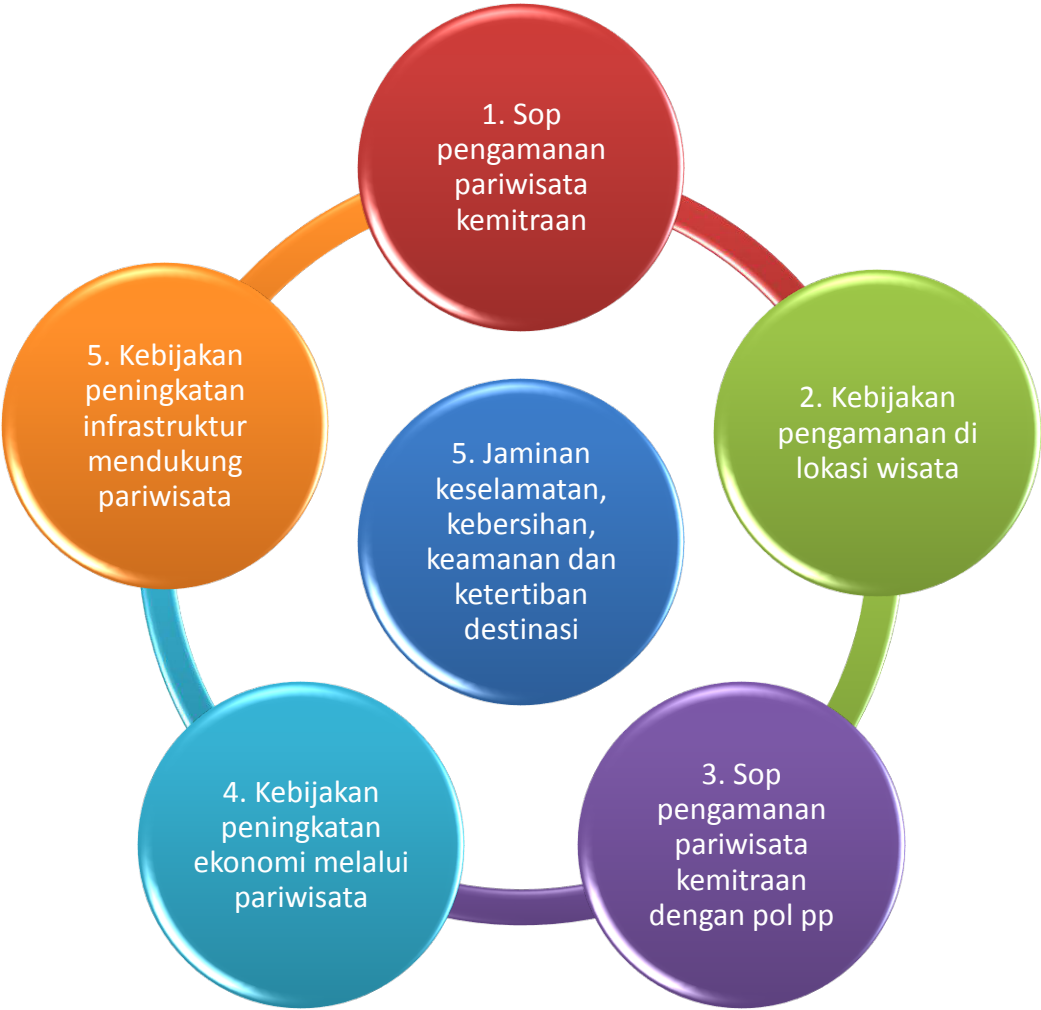
LEVEL 2 : 3. Peningkatan SDM , kelembagaan dan pemanfaatan teknologi



LEVEL 2 : 4. Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat



LEVEL 2 : 5. Jaminan keselamatan, kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi



Matrik Tematik Pariwisata Banten

	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	
	Pembangunan kepariwisataan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan	1	Kunjungan wisatawan
		2	Destinasi wisata

Integrasi Tema Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Indikasi Kegiatan	
1	Promosi Wisata Banten	Dinas Pariwisata	1	Strategi pengembangan pariwisata banten
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	Minimalisir perizinan pariwisata
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Sistem informasi pariwisata banten
2	Pengembangan destinasi wisata	Dinas Pariwisata	1	Destnasi wisata Banten (7 woderful)
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	Penataan wilayah pariwisata
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	pembangunan ruas pusat pariwisata
		Dinas Perhubungan	4	pembangunan atribut pusat pariwisata
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	Peningkatan Sekolah pariwisata
3	Peningkatan SDM , kelembagaan dan pemanfaatan teknologi	Dinas Pariwisata	1	Organisasi pariwisata penumbuh SDM
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	Pelatihan sdm pariwisata kerjasama
			3	Penumbuhan jurusan pariwisata
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	Kesertaan organisasi masyarkat dalam pariwisata dalam SDM dan lembaga
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	Kesertaan UMKM penunjang pariwisata
4	Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	6	Sistem Informasi pariwisata, kelembagaan UMKM, lembaga pendidikan pariwisata
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	penciptaan produk umkm penunjang pariwisata

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	penciptaan pola dukungan produk UMKM penunjang pariwisata
		Dinas Pariwisata	3	pengembangan budaya lokal dukungan penunjang pariwisata
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Penciptaan kurikulum khusus budaya pariwisata lokal pada sekolah pariwisata di Banten
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	Kemitraan strategis untuk membangun jenis kearifan lokal yang akan kembangkan
5	Jaminan keselamatan, kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi	Polisi	1	SOP pengamanan pariwisata kemitraan dengan polisi
		Dinas Pariwisata	2	Kebijakan pengamanan di lokasi wisata
		Satuan Polisi Pamong Praja	3	SOP pengamanan pariwisata kemitraan dengan pol-PP
		Biro Bina Perekonomian	4	Kebijakan peningkatan ekonomi melalui pariwisata
		Biro Infrastruktur & SD	5	Kebijakan peningkatan infrastruktur mendukung pariwisata

6.2.6.6 TEMATIK DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH

LEVEL 1 Daya saing perekonomian daerah yang dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi daerah



LEVEL 2 : 1 Kebijakan Tata kelola pemerintahan



LEVEL 2 : 2 Penguatan terhadap sektor perekonomian daerah



LEVEL 2 : 3 Kerjasama perekonomian antar daerah



LEVEL 2 : 4. Peningkatan peran Perbankan dan keuangan



LEVEL 2 : 5. Peningkatan Infrastruktur daerah



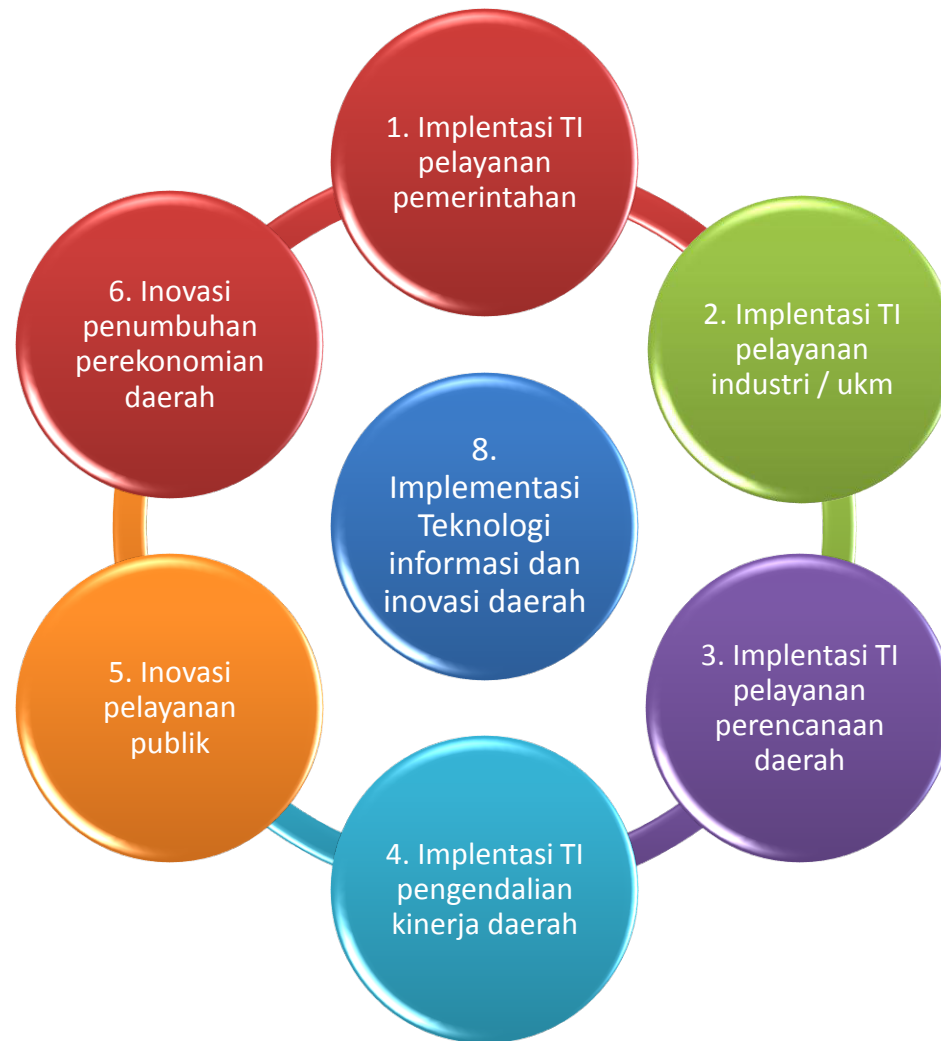
LEVEL 2 : 6. Pengelolaan Sumber daya alam yang berdaya saing



LEVEL 2 : 7. Pengeloaan Sumber daya manusia yang berdaya saing



LEVEL 2 : 8. Implementasi Teknologi informasi dan inovasi daerah



MATRIK TEMATIK DAYA SAING PEREKONOMIAN

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Daya saing perekonomian daerah yang dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi daerah	1	Laju Pertumbuhan ekonomi
		2	Investasi Daerah

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Kebijakan Tata kelola pemerintahan	Sekretariat Dewan	1	Pengelolaan regulasi Politik
		Biro Hukum	2	Regulasi Perda kemudahan usaha daerah
		Satpol PP	3	Pengelolaan aspek Kemanan/kriminalitas
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4	Investasi daerah dan pelayanan terpadu satu pintu
		Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5	Capaian kompetensi aparatur daerah
		Biro Bina Perekonomian	6	Kerjasama dan sinergi perusahaan daerah
2	Penguatan terhadap sektor Perekonomia daerah	Biro Bina Perekonomian	1	Kebijakan kinerja Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
		Biro Bina Perekonomian	2	Kebijakan kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian
		Biro Bina Perekonomian	3	Kebijakan kinerja Sektor Industri Pengolahan
		Biro Bina Perekonomian	4	Kebijakan kinerja Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
		Biro Bina Perekonomian	5	Kebijakan kinerja Sektor Konstruksi
		Biro Bina Perekonomian	6	Kebijakan kinerja Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
		Biro Bina Perekonomian	7	Kebijakan kinerja Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
		Biro Bina Perekonomian	8	Kebijakan kinerja Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
3	Kerjasama perekonomian antar daerah	Biro Bina Perekonomian	9	Kebijakan kinerja Jasa-Jasa
		Biro Bina Perekonomian	1	Kerjasama antar daerah dalam propinsi
		Biro Bina Perekonomian	2	Kerjasama antar daerah luar provinsi
		Biro Bina Perekonomian	3	Kerjasama antar provinsi
4	Peningkatan peran Perbankan dan keuangan	Biro Bina Perekonomian	4	Kerjasama internasional
		Biro Bina Perekonomian	1	Ketersediaan jumlah kantor cabang bank untuk melayani masyarakat

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Biro Bina Perekonomian	2	Ketersediaan jumlah lembaga keuangan non untuk melayani masyarakat
		Biro Bina Perekonomian	3	Ketersediaan produk perbankan untuk melayani masyarakat
		Biro Bina Perekonomian	4	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perbankan
		Biro Bina Perekonomian	5	Jumlah UKM yang memanfaatkan perbankan
5	Peningkatan Infrastruktur daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Panjang jalan dalam kondisi baik
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Jumlah jembatan dalam kondisi baik
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	Jumlah ketersediaan listrik untuk rumah tangga/usaha/industri
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Jumlah akses ketersediaan jaringan komunikasi
6	Pengelolaan Sumber daya alam yang berdaya saing	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Pengelolaan Sumber daya kemaritiman
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	Pengelolaan Sumber daya kehutanan
		Dinas Pertanian	3	Pengelolaan Sumber daya pertanian, peternakan dan perkebunan
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4	Pengelolaan Sumber daya alam tambang
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	Pengelolaan potensi perdagangan dan industri
		Dinas Pariwisata	6	Pengelolaan potensi pariwisata
		Biro bina perekonomian	7	Pengelolaan posisi geografis strategis Banten
7	Pengeloaan Sumber daya manusia yang berdaya saing	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Ketersedian dan daya saing sdm umk
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	Ketersediaan dan daya saing sdm industri
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	Ketersediaan sdm industri kreatif
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Keselarasan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	Tingkat produktifitas sdm Banten
8	Implementasi Teknologi informasi dan inovasi daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1	Implentasi TI pelayanan pemerintahan
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	2	Implentasi TI pelayanan industri / ukm
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Implentasi TI pelayanan perencanaan daerah
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Implentasi TI pengendalian kinerja daerah
		Biro Organisasi	5	Inovasi pelayanan publik
		Biro bina perekonomian	6	Inovasi penumbuhan perekonomian daerah

6.2.4 ARAH KEBIJAKAN KORIDOR EKONOMI BANTEN

Koridor ekonomi dalam pengertian *Asian Development Bank* adalah jaringan infrasturktur terintegrasi dalam geografi yang dicanangkan untuk menstimulasi pengembangan ekonomi, koridor tersebut berkembang antar negara, dalam sebuah negara atau antar kawasan-kawasan. Koridor ekonomi membuat infrastruktur terintegrasi seperti jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan serta menghubungkan antar kota-kota atau negara-negara.

Di indonesia telah dikembangkan 6 koridor ekonomi sebagai berikut :

- 1. Koridor Ekonomi Sumatera : Sebagai sentra produksi dan pengelolaan hasil bumi dan lumbung energi nasional;
- 2. Koridor Ekonomi Jawa : Sebagai pendorong industri dan jasa nasional;
- 3. Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi;
- 4. Koridor Ekonomi Sulawesi – Maluku Utara : sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian perkebunan dan perikanan nasional;
- 5. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara : Pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional;
- 6. Koridor Ekonomi Papua – Maluku sebagai Pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sejahtera;



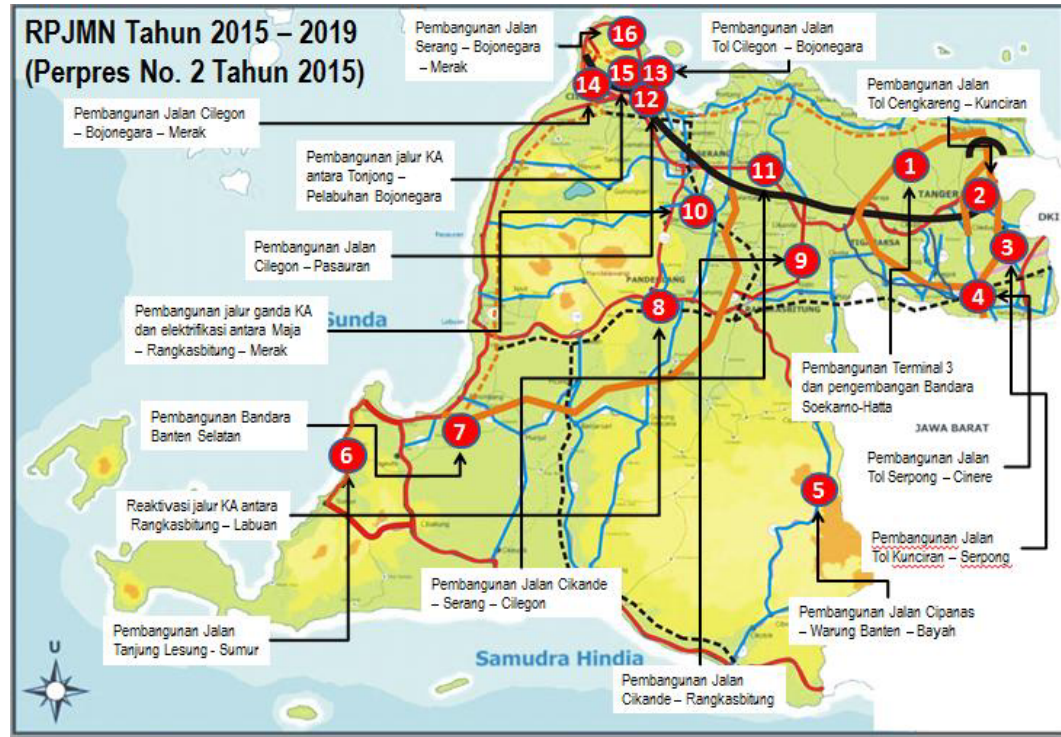
Gambar 6.4 Koridor Ekonomi Nasional

Terdapat pembangunan sarana strategi di Provinsi Banten yang telah ditetapkan dalam beberapa keputusan antara lain;

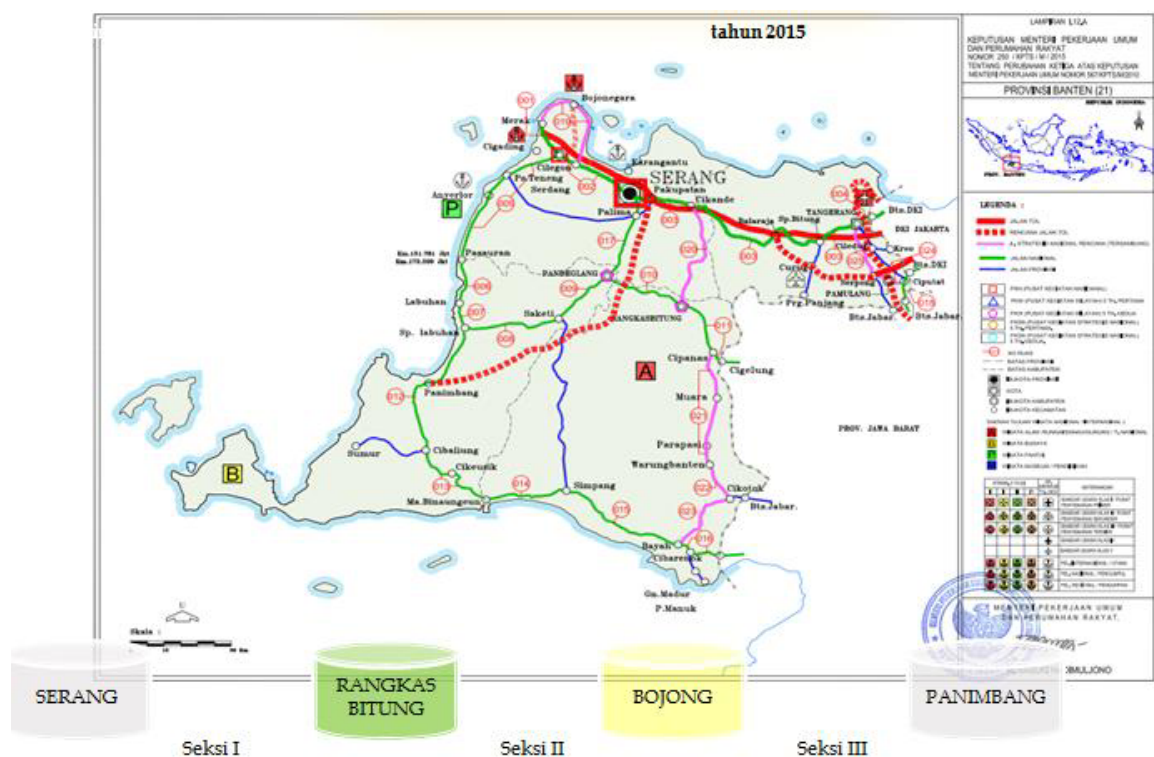
1. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional tahun 2015 – 2019 mencantumkan 15 proyek strategis nasional
2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten. Tentang Rencana Jalan Kerata Api Serang-Cikande-Cikupa-Serpong

Jalan Kerata Api ini merupakan salah satu angkutan massal baik untuk penumpang maupun barang. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas barang dan jasa dengan selesainya pembangunan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu mengurangi beban jalan Tol Jakarta Merak,

4. Pembangunan jalan tol Serang – Panimbang yang merupakan jalur transportasi strategis yang menghubungkan transportasi utara menuju ke selatan



Gambar 6.5 Proyek Starategis Nasional di Provinsi Baanten dalam RPJMN 2015- 2019



Gambar 6.8 Jalur Pembangunan Tol Serang-Panimbang

Berdasarkan rencana pengembangan proyek nasional tersebut dikembangkan Transit Oriented Development (TOD) yaitu model orientasi pengembangan transit yang merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan memaksimalkan penggunaan angkutan masal seperti kereta api, bus umum. Dengan demikian perjalanan/Trip akan didominasi menggunakan angkutan umum yang terhubung langsung dengan tujuan perjalanan, tempat pemberhentian angkutan umum yang mempunyai kepadatan relatif tinggi. Untuk itu kebijakan model TOD ini harus di tempatkan 1) pada jaringan utama angkutan masal, 2) pada koridor jaringan bus yang berfrekuensi tinggi, 3) pada jaringan penumpang bus yang waktu tempuhnya kurang dari 10 menit dari jaringan utama angkutan masal.

Ada beberapa tataruang campuran yang yang berorientasi pada pengembangan transit antara lain ;

1. Penggunaan ruang campuran yang terdiri dari pemukiman, perkantoran serta fasilitas pendukung.
2. Kepadatan penduduk yang tinggi ditandai dengan berkembangnya perumahan.

3. Tersedianya fasilitas perbelanjaan
4. Fasilitas kesehatan
5. Fasilitas pendidikan
6. Fasilitas hiburan
7. Fasilitas olah raga
8. Fasilitas perbankan

KORIDOR EKONOMI BANTEN

Dalam mengembangkan pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana telah dijabarkan, telah kembangkan Koridor Ekonomi Banten yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Koridor Utara : Menghubungkan sentra-sentra pertumbuhan primer Tangerang – Balaraja – Cikupa – Serang – Cilegon – Merak yang memfokuskan pada sektor industri manufaktur, perdagangan , logistik, permukiman dan jasa.
2. Koridor Tengah : Dibangun sepanjang jalur tol Serang – Panimbang menghubungkan sentra – sentra Serang – Pandegelang – Rangkasbitung – Panimbang. Yang memfokuskan pada sektor agrobisnis industri, pertanian, pengolahan hasil bumi dan laut, Peternakan, Perikanan dan Parawosata.
3. Koridor Selatan : Dirancang pembangunan Jalan tol Panimbang – Cikeusik –Simpang – Bayah – Sukabumi



Gambar 6.9 Pengembangan Koridor Ekonomi Banten

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan beserta program yang akan dilaksanakan.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah serta menggambarkan keterkaitan antar bidang pada urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran daerah beserta target pelaksanaan indikasi kegiatan tahunan selama 5 tahun.

Setelah kebijakan umum dan program pembangunan dibuat, langkah selanjutnya adalah meletakkan program pembangunan daerah sesuai bidang pada tiap urusan pemerintahan. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk kegiatan prioritas pembangunan.

Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detil dari visi misi kepala daerah yang terdiri dari program pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelompokkan pada masing-masing urusan dan meliputi program pembangunan dan kerangka pendanaan.

Penganggaran untuk melaksanakan urusan dan kewenangan pemerintah Provinsi Banten diformulasikan melalui belanja langsung dalam bentuk program kegiatan pada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah provinsi Banten, selanjutnya program unggulan yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, pola penganggarannya diformulasikan melalui bantuan keuangan khusus (*specific grand*) yang meliputi :

1. Bidang Pendidikan, ditujukan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola.

2. Bidang Kesehatan, ditujukan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola.
3. Bidang Infrastruktur, ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah

Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan selanjutnya diselaraskan dengan misi pembangunan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Program untuk mendukung misi ini adalah :

No	Bidang Urusan / Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
1	Administrasi Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH 1 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
	Program Tata Kelola Pemerintahan	
	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	
	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	
	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
2	Administrasi Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH 2 - BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	Program Tata Kelola Pemerintahan	
	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	
	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	
	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	
3	Administrasi Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH 3 - BIDANG ADMINISTRASI UMUM
	Program Tata Kelola Pemerintahan	
	Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan	
	Program Pelayanan Umum	
	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	
4	Administrasi Pemerintahan	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	Program Pembangunan Kemitraan	
5	Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
6	Pengawasan	INSPEKTORAT PROVINSI
	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
7	Komunikasi dan informatika	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
9	Persandian	
	Program Tata Kelola Persandian	

No	Bidang Urusan / Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
10	Statistik	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	
11	Perencanaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
12	Penelitian dan Pengembangan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
	Program Penelitian dan Pengembangan	
13	Pendidikan dan Pelatihan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Program Pengembangan SDM Aparatur	
15	Kepegawaian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	
16	Keuangan	SEKRETARIAT DEWAN
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	
17	Administrasi Pemerintahan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
18	Ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	
19	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	

2. Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Program untuk mendukung misi ini adalah :

No	Bidang Urusan / Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
1	Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
	Program Pembangunan Sumberdaya Air	
2	Tata Ruang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Penataan Ruang	
3	Perumahan dan Pemukiman	
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	
	Program Pengembangan dan Penataan Pusat Pemerintahan	

No	Bidang Urusan / Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
4	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	

3. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

Program untuk mendukung misi ini adalah :

No	Bidang Urusan / Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pendidikan Menengah	
	Program Pendidikan Khusus	
2	Kebudayaan	
	Program Pelestarian Kebudayaan	
3	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	
4	Kepemudaan dan Olah Raga	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga	
5	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
6	Kearsipan	
	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	

4. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Program untuk mendukung misi ini adalah :

No	Bidang Urusan / Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
1	Kesehatan	DINAS KESEHATAN, (RSUD BANTEN, RSUD MALINGPING)
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	
	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	

5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Program untuk mendukung misi ini adalah :

No	Bidang Urusan / Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
1	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	
2	Pariwisata	DINAS PARIWISATA
	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Program Pemasaran Produk Pariwisata	
3	Pertanian	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	
4	Energi dan Sumberdaya Mineral	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	
5	Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	
6	Perindustrian	
	Program Peningkatan Daya Saing Industri	
7	Sosial	DINAS SOSIAL
	Program Rehabilitasi Sosial	
	Program Pemberdayaan Sosial	
8	Ketenagakerjaan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	
9	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
10	Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
11	Kelautan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	
12	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
13	Kehutanan	
	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	
14	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	

Arah kebijakan umum merupakan penjabaran lebih detil dari visi misi kepala daerah yang terdiri dari program pada setiap Perangkat Daerah dikelompokkan pada masing-masing urusan yang meliputi program dalam kerangka regulasi.

Program pembangunan daerah Provinsi Banten dituangkan dalam Tabel 6.7 berikut :

Tabel 6.7
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Banten

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
1					Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)																													
1	1		Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	2,8	3.10		3.20		3.30		3.40		3.50		3.50																		
1	1	1	Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Capian LAKIP Provinsi Banten (Satuan: nilai)	CC	B		BB		BB		BB		A		A																Badan Penghubung, Setda, Set DPRD		
30	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan				123,936,883,181		124,256,575,404		132,166,857,524		131,992,371,645		145,643,553,145		657,996,240,899															Badan Penghubung, Setda, Set DPRD		
				Nilai IKM (Satuan: skala)	2.50	2.80		3		3		3		4		3.60																		
30	01	01	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan				1,864,417,500		1,864,417,500		1,864,417,500		1,864,417,500		1,864,417,500		9,322,087,500															Biro Organisasi		
				Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B (Satuan: %)	10.00	30.00		50.00		65.00		75.00		100.00		100.00																		
1	1	2	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP																BPKAD		
30	4	16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5,457,470,000		5,786,470,000		5,957,470,000		5,957,470,000		5,457,470,000		28,616,350,000														BPKAD Bidang Perbendaharaan dan Anggaran			

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Pesrsentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %)	75.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00	Bidang Perbendaharaan dan Anggaran	
1	1	3	Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari korupsi	Capaian Maturitas SPIP (Satuan: Nilai)	2.00	2.00		3.00		3.00		4.00		4.00		4.00	Inspektorat	
30	02	15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			12,472,800,000		12,722,200,000		13,566,500,000		13,386,600,000		12,698,500,000		64,846,600,000	Inspektorat	
				Capaian Nilai SAKiP (Satuan: %)	55.00	75.00		75.00		80.00		83.00		85.00		85.00	Irban 1 s.d 4	
				Indek Integritas (Satuan: poin)	72.48	73.48		74.48		75.48		76.48		77.48		77.48	Irban 1 s.d 4	
				Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai)	2.00	2.00		3.00		3.00		4.00		4.00		4.00	Irban 1 s.d 4	
				Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Irban 1 s.d 4	
1	1	4	Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: %)	20.00	42.10		61.83		81.27		100.00		100.00		100.00	Diskominfo	
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Satuan: Nilai)	88,08	88,08		89		89,55		90		90		90		
12	10	15	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			7,689,600,000		7,843,400,000		8,363,950,000		8,253,000,000		7,828,800,000		39,978,750,000	Diskominfo Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
				Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	12.14	30.26		48.38		67.31		85.08		100.00		100.00	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
12	15	15	Program Tata Kelola Persandian			1,157,600,000		1,180,700,000		1,259,100,000		1,242,400,000		1,178,500,000		6,018,300,000	Diskominfo Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi (Satuan: %)	10.00	20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan
1	1	5	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan: %)	60.00	65.00		70.00		75.00		80.00		80.00		80.00		Bappeda
30	03	15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				8,802,029,600		8,993,329,600		9,817,729,600		9,535,529,600		9,156,129,600		46,304,748,000	Bidang P4
				Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	100.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		Bidang P4
				Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang P4
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		Bidang P4
				Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)	50.00	70.00		75.00		75.00		80.00		85.00		85.00		Bidang P4
12	14	01	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah				2,464,000,000		2,513,300,000		2,680,000,000		2,644,600,000		2,508,700,000		12,810,600,000	Bappeda, Diskominfo
				Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	30.00	50.00		60.00		70.00		80.00		90.00		90.00		Bidang PS dan LP DiskOMINFO dan Bidang Litbang BAPPEDA
1	1	5	Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan (Satuan: %)	50.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
30	07	15	Program Penelitian dan Pengembangan				4,977,900,000		5,077,500,000		5,414,400,000		5,342,600,000		5,068,000,000		25,880,400,000	Bappeda
				Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	30.00	50.00		60.00		75.00		80.00		80.00		80.00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	30.00	50.00		60.00		75.00		80.00		100.00		100.00		
1	1	6	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (Satuan: %)	5.00	10.00		15.00		20.00		25.00		30.00		30.00	BKD	
30	05	15	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah			4,359,073,000		4,459,073,000		4,759,073,000		4,659,073,000		4,459,073,000		22,695,365,000	-Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai, -Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian	
				Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)	0.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00	Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai	
				Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	0.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00	Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian	
				Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	0.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00	Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian	
1	1	7	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Prosentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (Satuan: %)	5.00	10.00		15.00		20.00		25.00		30.00		30.00	BPSDM	
30	06	15	Program Pengembangan SDM Aparatur			18,706,934,000		18,906,934,000		19,719,434,000		20,388,434,000		18,906,934,000		96,628,670,000	BPSDM -Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan, -Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	
				Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	
				Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	1	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	8	Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (Satuan: %)	62.89	59.30		60.62		61.91		63.19	64.44	64.44		64.44		Bapenda
30	04	15	Program Peningkatan Pendapatan Daerah				9,808,953,400		10,108,953,400		10,408,953,400		10,408,953,400		10,378,253,400		51,114,067,000	Bidang Pendapatan Pajak Daerah Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Satuan: %)	55.60	57.58		58.94		60.29		61.62		62.93		62.93		Bidang Pendapatan Pajak Daerah
				Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (Satuan: %)	44.40	42.42		41.06		39.71		38.38		37.07		37.07		Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
1	1	9	Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	70,00	75.00		75.00		80.00		80.00		85.00		85.00		Satpolpp
11	05	15	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah				850,000,000		900,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		9,250,000,000	BID. Penegakan Perundang-undangan Daerah
				Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	70.00	75.00		75.00		80.00		80.00		85.00		85.00		BID. Penegakan Perundang-undangan Daerah
1	1	10	Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten (Satuan: %)	68.46	70.00		74.00		76.00		78.00		80.00		80.00		Badan Kesbangpol
				Angka Kriminalitas (Satuan: Jumlah)	5,002.00	4,800.00		4,500.00		4,300.00		4,000.00		3,800.00		3,800.00		Badan Kesbangpol
11	05	17	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan				2,909,968,000		3,000,000,000		3,909,968,000		3,909,968,000		3,909,968,000		17,639,872,000	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)	70.83	0.00		73.00		0.00		0.00		0.00		73.00		Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
				Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	63.00	0.00		0.00		0.00		0.00		65.00		65.00		Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
1	1	11	Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana (Satuan: Nilai)	133.00	133.00		125.00		120.00		115.00		110.00		110.00		BPBD
11	05	16	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				3,570,445,500		4,141,528,000		5,570,445,500		5,570,445,500		5,570,445,500		24,423,310,000	Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
				Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
1	1	12	Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan (Satuan: %)	50.00	80.00		80.00		85.00		90.00		95.00		95.00		DP3AKKB
12	06	15	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				880,000,000		897,600,000		957,200,000		944,500,000		896,000,000		4,575,300,000	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
				Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	60.00	64.86		67.38		69.49		71.24		72.70		73.92		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
				Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)	20.00	23.33		30.81		37.87		43.76		48.67		52.76		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
				Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	80.00	85.76		86.47		87.06		87.55		87.96		88.30		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
				Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)	77.00	79.19		80.99		82.49		83.74		84.79		85.66		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
				Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)	80.00	85.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	1	13	Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Set DPRD		
30	01	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			135,757,270,500		136,075,787,950		142,137,100,100		141,852,825,900		170,057,844,400		725,880,828,850	Set DPRD	
				Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	0.00	100.00		100		100.00		100		100.00		100.00	Bagian Hukum dan Persidangan	
				Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)	0.00	100.00		100		100.00		100		100.00		100.00	Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan	
				Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %)	0.00	100.00		100		100.00		100		100.00		100.00	Bagian Aspirasi dan Humas	
1	1	15	Pelayanan Publik Yang berkualitas	Capaian Pelayanan Publik	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Badan Penghubung	
30	01	16	Program Pembangunan Kemitraan			1,832,777,319		1,933,167,646		1,928,473,376		1,967,033,455		1,967,033,455		9,628,485,251	Badan Penghubung	
				Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)	0.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Badan Penghubung	
2			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur															
2	1		Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Capaian kinerja infrastruktur daerah	50.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1	1	Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas	Tingkat Kemantapan Jalan	78,98	87.43		89.00		91.50		94.00		96.50		96.50		DPUPR
11	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				1,282,251,405,200		1,292,239,705,200		1,307,277,000,000		1,264,640,600,000		1,324,607,700,000		6,471,016,410,400	Dpupr Bid. Bina Marga - Balai Jalan & Jembatan
				Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	74.45	79.56		84.67		100.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Bina Marga - Balai Jalan & Jembatan
				Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	26.60	27.20		28.99		30.78		33.17		35.56		35.56		Bid. Bina Marga
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	83.00	86.30		89.70		93.10		96.50		100.00		100.00		Bid. Bina Marga
2	1	5	Penanggulangan Banjir dan Abrasi, serta Ketersediaan Air Baku	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	15,51	20.89		26.27		32.65		37.09		42.42		42.42		DPUPR
				Pemenuhan tingkat layanan irigasi	15.118,50	15,333		16,722		18,111		19,499		20,888		20,888		DPUPR
11	03	17	Program Pembangunan Sumberdaya Air				148,491,294,800		148,491,294,800		150,000,000,000		160,000,000,000		170,000,000,000		776,982,589,600	BID. Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air Balai PSDA
				Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir(Satuan:)	15.51	20.89		26.27		31.65		37.09		42.41		42.41		BID. Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air
				Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: ha)	15,118.50	15,332.98		16,721.78		18,110.58		19,387.46		20,888.19		20,888.19		BID. Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air
				Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	46.21	51.59		56.97		62.35		67.73		73.11		73.11		BID. Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air
2	1	2	Perencanaan dan Penataan ruang yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	80.00	82.50		85.00		87.50		90.00		92.50		92.50		DPUPR
11	03	18	Program Penataan Ruang				4,920,000,000		4,920,000,000		5,000,000,000		5,500,000,000		6,000,000,000		26,340,000,000	Bid. Tata Ruang
				Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi(Satua%)	0.00	25.00		37.50		62.50		75.00		100.00		100.00		Bid. Tata Ruang

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	1	3	Tersedianya Perumahan dan Pemukiman yang layak. Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	375.29	114.60		203.20		274.60		333.30		375.29		375.29	DPRKP	
				Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: Hektar)	82.86	84.02		85.18		86.34		87.50		88.66		0.00	DPRKP	
				Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	DPRKP	
11	04	15	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			87,434,896,540		89,954,896,540		114,351,500,000		162,329,896,540		172,340,696,540		626,411,886,160	-Bid. Kawasan Permukiman, -Bid. Perumahan	
				Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	375.29	114.60		203.20		274.60		333.30		333.30		375.29	Bid. Kawasan Permukiman,	
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	82.86	84.02		85.18		86.34		87.50		88.66		88.66	Bid. Perumahan	
2	1	6	Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	30.00	40.00		50.00		60.00		70.00		80.00		80.00	DPRKP	
11	04	16	Program Pengembangan dan Penataan Pusat Pemerintahan			26,875,000,000		27,875,000,000		36,875,000,000		146,875,000,000		176,875,000,000		415,375,000,000	UPT KP3B	
				persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	0.00	25.00		50.00		75.00		88.00		100.00		100.00	UPT KP3B	
				persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	0.00	28.00		69.00		83.00		89.00		100.00		100.00	UPT KP3B	
2	1	4	Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan lalulintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	10.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		90.00	Dishub	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	09	15	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan		4,642,000,000		4,742,000,000		4,842,000,000		4,842,000,000		4,842,000,000		23,910,000,000	Bidang Pengembangan Transportasi
				Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		Bidang Pengembangan Transportasi
				Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		20.00	60.00	Bidang Pengembangan Transportasi
2	1	7	kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00	90.00	Dishub
12	09	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan		3,200,000,000		3,300,000,000		3,300,000,000		3,300,000,000		3,300,000,000		16,400,000,000	Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
				Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	0.00	0.00		0.00		14.29		28.57		42.86	57.14	Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
				Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	10.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00	90.00	Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
				Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00	90.00	Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
3			Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas													
3	1		Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing	Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun)	8.37	8.47		8.70		8.90		9.10		9.30	9.30	
3	1	1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Rata rata lama sekolah	8.37	8.47		8.70		8.90		9.10		9.30	9.30	Dindikbud
				Harapan lama sekolah	12.70	13.00		13.50		14.00		14.50		15.00	15.00	Dindikbud

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	01	15	Program Pendidikan Menengah			724,856,659,000		746,599,800,000		804,046,500,000		450,838,800,000		511,149,000,000		3,237,490,759,000	Bidang SMA Bidang SMK	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)	71.13	72.9		74.67		76.45		78.22		80.00		80	Bidang SMA Bidang SMK	
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)	57.21	58.77		60.33		61.88		63.44		65.00		65	Bidang SMA Bidang SMK	
				Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)	0.25	0.22		0.19		0.16		0.13		0.1		0.1	Bidang SMA Bidang SMK	
				Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)	0.5	0.44		0.38		0.32		0.26		0.2		0.2	Bidang SMA Bidang SMK	
				Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)	98.83	98.64		98.85		99.07		99.28		99.49		99.49	Bidang SMA Bidang SMK	
				Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)	99.87	99.89		99.9		99.92		99.93		99.95		99.95	Bidang SMA Bidang SMK	
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)	50.7	51.96		53.22		54.48		55.74		57		57	Bidang SMA Bidang SMK	
				Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	54.7	55.5		56.3		57.1		57.9		58.7		58.7	Bidang SMA Bidang SMK	
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)	47.6	48.68		49.76		50.84		51.92		53		53	Bidang SMA Bidang SMK	
				Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)	10.00	17.00		34.00		51.00		68.00		85.00		85.00	Bidang SMA Bidang SMK	
11	01	16	Program Pendidikan Khusus				9,795,900,000		9,991,900,000		10,654,900,000		10,513,700,000		9,973,300,000		50,929,700,000	Bid. Pendidikan Khusus
				Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	15.00	17.00		34.00		51.00		68.00		85.00		85.00	Bid. Pendidikan Khusus	
3	1	2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	30.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dindikbud	
12	16	15	Program Pelestarian Kebudayaan				3,203,289,000		3,268,289,000		3,503,289,000		3,603,289,000		3,352,989,000		16,931,145,000	Bid. Kebudayaan
				Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	70.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00	Bid. Kebudayaan	
				Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)	70.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00	Bid. Kebudayaan	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	70.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Kebudayaan
				Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	70.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Kebudayaan
3	1	3	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	10.00	10.00		20.00		30.00		40.00		45.00		45.00		Dispora
				Indeks Pembangunan Olahraga	10.00	10.00		20.00		30.00		40.00		45.00		45.00		
12	13	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan			3,950,000,000		4,050,000,000		4,950,000,000		4,150,000,000		3,950,000,000		21,050,000,000	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda	
				Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %)	70.00	75.00		80.00		85.00		90.00		100.00		100.00		Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
				Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)	0.00	75.00		80.00		85.00		90.00		100.00		100.00		Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
12	13	16	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga			5,574,835,000		5,665,135,000		5,974,835,000		256,804,635,000		343,078,035,000		617,097,475,000	Bidang Pemberdayaan Olahraga	
				Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)	50.00	70.00		75.00		80.00		85.00		85.00		85.00		Bidang Pemberdayaan Olahraga
3	1	4	Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) yang berkualitas	Indeks pembangunan gender (IPD)	91.39	91.67		91.95		92.23		92.51		92.79		92.79		DP3AKKB
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.74	69.54		70.34		71.14		71.94		72.74		72.74		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12	02	15	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera				3,806,605,000		3,856,605,000		4,106,605,000		4,006,605,000		3,806,605,000		19,583,025,000	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
				Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	50	60		63.33		66.11		68.43		70.35		71.96		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
				Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	50	50		55		59.17		62.64		65.53		67.94		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
				asio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	58.72	58.72		62.27		65.22		67.69		69.74		71.45		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
				Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	70	75		75		87.5		87.5		100		100		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
				Indek Ketahan Keluarga (Satuan: %)	65.19	66.66		67.62		68.58		69.40		70.10		70.10		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
3	1	5	Minat Baca Masyarakat yang meningkat	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	25.10	30.00		35.00		40.00		45.00		50.00	50.00	50.00		DPAD
12	17	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				3,479,100,000		3,549,100,000		3,679,100,000		3,679,100,000		3,559,100,000		17,945,500,000	Bidang Pembinaan dan Pengembangan
				Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan:%)	75.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
3	1	6	Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00	100.00	100.00		100.00		DPAD
12	18	15	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan				3,250,800,000		3,315,800,000		3,535,800,000		3,488,900,000		3,309,600,000		16,900,900,000	DPAD Bidang Pengelolaan Arsip

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		Bidang Pengelolaan Arsip
				Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		Bidang Pengelolaan Arsip
				Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	70.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Pengelolaan Arsip
4			Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas															
4	1		Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	69.46	69.76		70.06		70.36		70.66		70.96		70.96		
4	1	1	Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	32.00	31.00		30.00		29.00		28.00		26.00		26.00		DINKES
				Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	308.00	304.00		300.00		290.00		290.00		285.00		285.00		DINKES
11	02	15	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat			1.711.000.000		2.075.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.800.000.000		1.048.287.699.643		Bid. Kesehatan Masyarakat
				Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	45.00	65.00		81.00		86.00		90.00		94.00		94.00		Bid. Kesehatan Masyarakat
				Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Kesehatan Masyarakat
				Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	50.00	55.00		60.00		75.00		80.00		90.00		100.00		Bid. Kesehatan Masyarakat
4	1	2	Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	75.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		DINKES
11	02	16	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			128.581.505.000		132.300.000.000		102.400.000.000		102.400.000.000		102.400.000.000		10.986.000.000		Bid. Pelayanan Kesehatan
				Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	75.00	90.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Pelayanan Kesehatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	45.00	65.00		81.00		86.00		90.00		94.00		94.00		Bid. Pelayanan Kesehatan
				Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan:%)	10.00	20.00		35.00		50.00		75.00		90.00		90.00		Bid. Pelayanan Kesehatan
				Perentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)	0.00	20.00		30.00		40.00		50.00		50.00		50.00		Bid. Pelayanan Kesehatan
4	1	3	Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup	69.46	69.76		70.06		70.36		70.66		70.96		70.96		DINKES
11	02	17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan				118.901.451.886		146.306.978.140		140.971.235.220		171.981.789.010		199.277.141.101		568.081.505.000	RSUD BANTEN & RSUD MALIMPING
				Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Bantent (Satuan:%)	70.00	70.00		70.00		75.00		75.00		85.00		85.00		RSUD BANTEN & RSUD MALIMPING
				Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)	88.00	88.00		88.00		88.00		90.00		93.00		93.00		RSUD BANTEN & RSUD MALIMPING
				Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten	70.00	70.00		75.00		80.00		85.00		90.00		90.00		RSUD BANTEN & RSUD MALIMPING
				Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %)	50.00	60.00		70.00		70.00		80.00		80.00		80.00		RSUD BANTEN & RSUD MALIMPING
				Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)	30.00	40.00		50.00		50.00		100.00		100.00		100.00		RSUD BANTEN & RSUD MALIMPING
				Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)	50.00	60.00		70.00		70.00		80.00		80.00		80.00		RSUD BANTEN & RSUD MALIMPING
4	1	4	Laju Pertumbuhan Penduduk yang terkendali	Laju pertumbuhan penduduk	2.01	1.96		1.91		1.85		1.80		1.75		1.75		DP3AKKB
12	08	15	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana				2,467,400,000		2,516,700,000		2,683,700,000		2,648,100,000		2,512,000,000		12,827,900,000	Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Angka kelahiran total(totalfertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)	2.40	2.33		2.29		2.26		2.23		2.21		2.21		Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)	59.00	60.90		61.00		61.08		61.15		61.21		61.29		Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)	10.30	10.26		10.18		10.12		10.07		10.02		9.98		Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
				Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	2.60	2.53		25.18		25.09		25.01		24.94		24.88		Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
5			Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi															
5	1		Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	LPE	5.70	6.00		6.20		6.40		6.70		7.00		7.00		
				TPT	8.69	8.45		8.20		7.95		7.68		7.40		7.40		
				Kemiskinan	5.25	5.13		5.00		4.87		4.74		4.60		4.60		
				Inflasi	4.00	3.70		4.20		4.00		4.00		4.00		4.00		
5	1	1	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Nilai Investasi	52.30	56.40		60.80		65.00		69.30		73.90		73.90		DPMPTSP
				Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	82.16	83.62		85.22		86.85		88.52		90.23		90.23		
12	12	15	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi			4,700,515,000		4,700,515,000		4,700,515,000		4,700,515,000		4,700,515,000		23,502,575,000		Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: triliyun)	12.4	15		17.5		20		22.5		25		25		Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD
				Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun)	39.9	43		47		51		55		59		59		Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD
5	1	2	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	3.05	3.70		3.95		4.20		4.45		4.70		4.70		Disperindag
20	07	15	Program Peningkatan Daya Saing Industri				2,593,200,000		2,593,200,000		2,593,200,000		2,593,200,000		2,593,200,000		12,966,000,000	Bidang Perindustrian
				Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	0	20		20		20		20		20		20		Bidang Perindustrian
				Persentase Kerjasama SDM Berkompotensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	0	20		20		20		20		20		20		Bidang Perindustrian
				Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		Bidang Perindustrian
5	1	3	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4.19	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		Disperindag
				LPE Sektor Perdagangan	3.82	4.90		5.40		5.90		6.40		6.90		6.90		
20	06	15	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri				106,217,259,850		56,375,459,850		6,910,959,850		6,796,859,850		6,360,459,850		182,660,999,250	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
				Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	0	5		5		5		5.00		5.00		5		Bidang Perdagangan Dalam Negeri
				Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	5	10		12		14		16.00		18.00		18		Bidang Perdagangan Dalam Negeri
				capaian stabilitas harga barang pokok (Satuan: %)	6.93	5		5		5		5.00		5.00		5		Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100	100		100		100		100.00		100.00		100		Bidang Perdagangan Dalam Negeri
			Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri				1,292,573,000		1,292,573,000		1,292,573,000		1,292,573,000		1,292,573,000		6,462,865,000	Bidang Perdagangan Luar Negeri
				Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD)	2828.83	2,970.27		3,118.7 9		3,274.72		3,438.4 6		3,610.38		3,610.38		Bidang Perdagangan Luar Negeri
5	1	4	Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4.48	4.55		4.67		4.72		4.80		4.93		4.93		DKP
20	01	15	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				12,248,733,825		12,248,733,825		12,248,733,825		12,248,733,825		12,248,733,825		61,243,669,125	Bidang Perikanan Tangkap - BPPP
				Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	7.49	8.01		8.08		8.16		8.23		8.61		8.62		Bidang Perikanan Tangkap BPPPi
5	1	5	Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	82.40	89.20		90.60		91.67		94.10		96.67		96.67		Dinas Ketapang
12	03	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				3,298,272,500		3,491,172,500		3,643,772,500		3,643,772,500		3,572,772,500		17,649,762,500	Ketapang Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
				Ketersediaan pangan (Satuan: %)	93.90	95.10		96.30		97.50		96.80		100.00		100.00		Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
5	1	6	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2.84	2.89		2.94		2.99		3.04		3.09		3.09		DISPAR
20	02	15	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				2,650,000,000		2,750,000,000		3,650,000,000		3,050,000,000		2,850,000,000		14,950,000,000	Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	2.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00		Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	02	16	Program Pemasaran Produk Pariwisata				6,475,000,000		6,587,900,000		6,541,300,000		6,774,600,000		6,475,000,000		32,853,800,000	Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
				Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	14,705,763	15,146,936		15,601, 344		16,361,411		17,528, 110		19,105,6 40		83,763,44 1		Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
				Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1.33	1.36		1.39		1.44		1.54		1.60		1.60		Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
				Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3,634,490	3,743,525		3,852,2 16		4,044,827		4,327,9 65		4,760,76 1		4,145,859		Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
5	1	7	Kelembagaan Koperasi yang aktif dan sehat	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	0.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		30.00		Dinas KUKM
12	11	16	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi				4,244,190,500		4,244,190,500		4,744,190,500		4,600,390,500		4,300,090,500		22,133,052,500	Bidang Pemberdayaan Koperasi
				Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)	0.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		30.00		Bidang Pemberdayaan Koperasi
5	1	8	koperasi dan Usaha Kecil yang berdaya	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	0.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00		Dinas KUKM
12	11	15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil				4,635,352,000		4,735,352,000		5,035,352,000		5,035,352,000		4,735,352,000		24,176,760,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
				Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)	0.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00		Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
5	1	9	Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	8.24	4.49		3.89		3.30		2.68		2.08		2.08		DINSOS
				Index Gini	0.39	0.39		0.39		0.38		0.37		0.37		0.37		
11	06	15	Program Rehabilitasi Sosial				1,764,850,000		1,764,850,000		1,894,850,000		1,894,850,000		1,764,850,000		9,084,250,000	BID. Rehabilitasi Sosial
				Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: Orang)	1429	573		608		663		718		723		3285		BID. Rehabilitasi Sosial
5	1	10	Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	95.64	97.00		98.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas ESDM

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
20	05	16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan				15,427,130,000		15,427,130,000			16,998,130,000		16,663,430,000		15,427,130,000		79,942,950,000	Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
				Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: Rumah Tangga)	10,000.00	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		150,000			Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
5	1	11	Pengendalian, pengawasan dan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	12.00	12.50		13.00		13.50		14.00		15.00		15.00			Dinas ESDM
20	05	15	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara				4,129,442,000		4,293,642,000			4,293,642,000		4,293,642,000		4,293,642,000		21,304,010,000	Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara
				Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	60.00	65.00		70.00		75.00		80.00		85.00		85.00			Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara
				Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	37.67	41.10		44.52		47.95		51.37		54.79		54.79			Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara
5	1	12	Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri	Persentase Desa Mandiri	14.00	16.40		18.80		21.20		23.60		26.00		26.00			Dinas PMD
12	07	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4,031,500,000		4,131,500,000			4,377,000,000		4,339,500,000		4,331,500,000		21,211,000,000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: Desa)	158	2		2		2		2		2		2		148	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: Desa)	1022	2		2		2		2		2		2		1012	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	1	13	Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58.06	59.06		60.06		61.06		62.06		63.06		63.06			Disnakertrans

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	01	15	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja			5,831,730,000		5,831,730,000		6,331,730,000		6,331,730,000		5,931,730,000		30,258,650,000	BID. Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja	
				Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4.31	4.35		4.4		4.42		4.44		4.46		4.46	BID. Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja	
5	1	14	Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43.67	44.17		44.67		45.17		45.67		46.17		46.17	DLHK	
12	05	15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			13,142,300,000		13,405,100,000		14,294,700,000		14,105,200,000		13,380,200,000		68,327,500,000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran - Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	
				Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	51.00	51.50		52.00		52.50		53.00		53.50		53.50	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran	
				Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	58.80	59.00		59.20		59.40		59.60		59.80		59.80	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran	
				Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)	203.00	52.00		60.00		68.00		76.00		78.00		281.00	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	
5	1	15	Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	30.60	31.21		31.71		32.21		32.71		33.21		33.21	DLHK	
20	04	15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan			7,744,000,000		7,898,900,000		8,423,100,000		8,311,400,000		7,884,200,000		40,261,600,000	- Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan - Bidang Pengelolaan DAS.	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																		KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
				Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar)	69,466.00	5,000.00		5,000		5,000.00		5,000.00		5,000.00		94,466.00		Bidang Pengelolaan DAS, KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
				Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)	38.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		48.00		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
5	1	16	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRD	7.05	5.30		5.60		5.80		6.00		6.20		6.20		DISTAN
20	03	15	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan			6,104,225,000		6,104,225,000		6,104,225,000		6,104,225,000		6,104,225,000		30,521,125,000		Bidang Tanaman Pangan, - BPBITPH, BPSB, BPTPH
				Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan: Ton/Ha)	55.68	57.35		59.07		60.84		62.67		64.55		64.55		Bidang Tanaman Pangan, - BPBITPH, BPSB, BPTPH
				Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2,396,688	2,408,671		2,420,714		2,432,818.00		2,444,982.00		2,457,207.00		12,164,394.00		Bidang Tanaman Pangan, - BPBITPH, BPSB, BPTPH
				Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	20,551.00	21,579.00		22,657		23,790.00		24,980.00		26,229.00		119,235.00		Bidang Tanaman Pangan, - BPBITPH, BPSB, BPTPH
				Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	6,801.00	7,141.05		7,498.10		7,873.01		8,266.65		8,679.99		39,458.81		Bidang Tanaman Pangan, - BPBITPH, BPSB, BPTPH